

DOKUMEN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan
Penyempurnaan Rancangan Akhir

2025



**DES
D
M**



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Jl. Syech Nawawi Al Bantani - Palima, Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

KATA PENGANTAR

Assalamu'alakum Wr. Wb



Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 yang memuat Perubahan Rencana Kerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk tahapan Penyempurnaan Rancangan Akhir dan hasil tindak lanjut Laporan Hasil Review (LHR) Inspektorat.

Perubahan RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 dan juga sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Perubahan RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025 ini. Semoga, dokumen ini nantinya dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten.

Serang, Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	12
2.1 Review terhadap Pelaksanaan Renja Tahun 2024	12
2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	53
3.3 Program dan Kegiatan	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB V PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rincian efisiensi dan pengurangan APBD TA. 2025 untuk Dinas ESDM Provinsi Banten	14
Tabel 2.2.	Perubahan pagu dan target kinerja RENJA Dinas ESDM pada DPA-SKPD TA. 2025	16
Tabel 2.3.	Rekapitulasi perubahan pagu dan target kinerja RENJA Dinas ESDM pada DPA-SKPD TA. 2025	20
Tabel 2.4.	Grafik Realisasi pelaksanaan APBD DESDM Provinsi Banten TA. 2025 Sampai dengan Triwulan II	23
Tabel 2.5.	Realsiasi Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran DESDM Provinsi Banten Tahun 2025 dengan Triwulan II	24
Tabel 2.6.	Realsiasi Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja Program DESDM Provinsi Banten Tahun 2025 dengan Triwulan II	28
Tabel 2.7.	Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Output) DESDM Provinsi Banten Tahun 2025 dengan Triwulan II	33
Tabel 2.8.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Banten dan Pencapaian Renstra ESDM Provinsi Banten sampai dengan Tahun 2025	41
Tabel 3.1.	Prioritas pembangunan Sektor ESDM dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2025	52
Tabel 3.2.	Interkoneksi Prioritas Daerah Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional untuk Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	53
Tabel 3.3.	Tujuan dan Sasaran RENJA DESDM Tahun 2024	54
Tabel 3.4.	Program Prioritas dalam Perubahan pada Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025	56
Tabel 3.5.	Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Penyempurnaan RANHIR Perubahan RENJA Dinas ESDM Provinsi Bante Tahun 2025	58
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana dan Pendanaan dari Perubahan RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
-------------	---	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tentang Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025
- Lampiran 2 : Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tentang Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025
- Lampiran 3 : Rumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten (Kertas Kerja Verifikasi dan Hasil Cetak Aplikasi SIPD-RI)

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

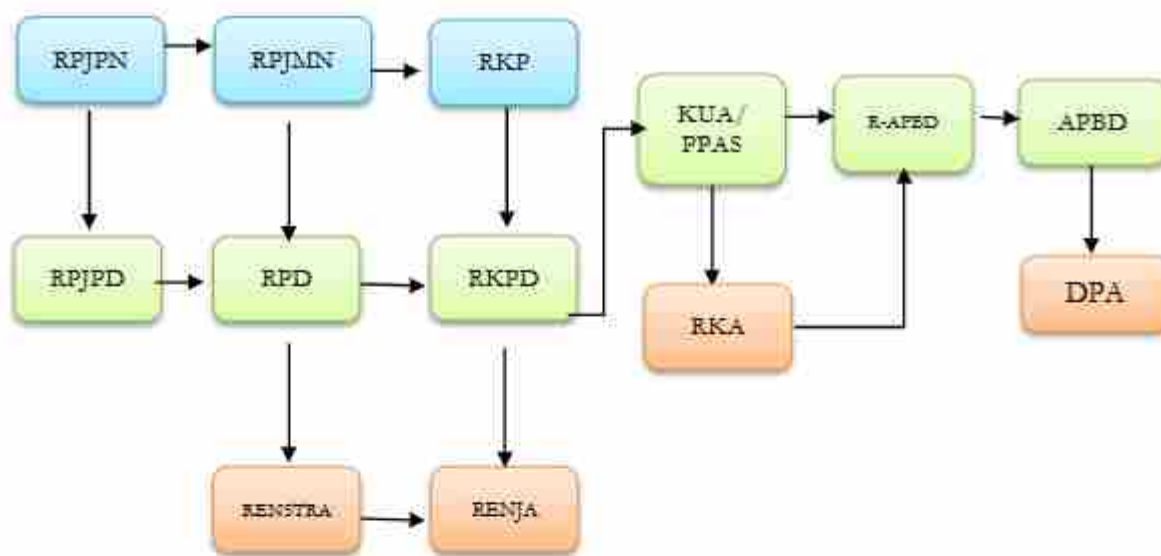
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan tahunan di Perangkat Daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) yang telah disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Dalam rangka melaksanakan amanat perundang-undangan tersebut dan sejalan dengan kebutuhan Perangkat Daerah dalam penyiapan perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) untuk tahun 2025 serta dengan memperhatikan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten melaksanakan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 yang didalamnya memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (Pasal 13 ayat 2 PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017).

Sebagai bentuk keterpaduan dan kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RENJA Perangkat Daerah tersebut berpedoman dan mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024. Dalam hal ini, pola keterpaduan dan kesinambungan dalam proses penyusunan RENJA-SKPD tersebut mengacu dan dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2008 dan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disebutkan diatas. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1.1.

Hubungan Rencana Kerja (RENJA) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selain itu, sebagai wujud proses perencanaan partisipatif dan dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 131 ayat 2 serta pasal 136 dan 137 PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017, maka dalam proses penyusunannya, dokumen RENJA Perangkat Daerah tersebut melibatkan partisipasi aktif instansi terkait 8 (delapan) wilayah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten tahun 2025, untuk :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan kabupaten/kota;
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Memperhatikan tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Provinsi Banten tahun 2025, yaitu *“Pembangunan Kolaboratif yang Inklusif untuk Memperkokoh Masyarakat Banten yang Modern dalam rangka Mencapai Banten yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”*, serta rumusan program/kegiatan perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang disampaikan pada Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025, maka ditetapkan tema perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2025, yaitu **“Memperkokoh Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Pengusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral melalui pembangunan kolaboratif yang inklusif untuk mencapai Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing”**.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang termaktub dalam dokumen RKPD Provinsi Banten tahun 2025, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

maka penyusunan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 difokuskan pada upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan untuk urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral dengan prioritas pembangunan terkait, yaitu prioritas 2, 3, dan 4.

Dalam perkembangannya, RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025, mengalami perubahan substansi seiring dengan dilaksanakannya penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 di akhir tahun 2024 maupun pada saat dilaksanakannya APBD Provinsi Banten TA. 2025 pada periode Bulan Januari-Juni 2025, baik komposisi dan jumlah anggaran maupun target-target kinerja yang dicanangkannya, yang disebabkan oleh :

1. Adanya revisi alokasi anggaran dari TAPD Provinsi Banten dari Rp. 49.133.595.000 (pagu di RKPD Provinsi Banten dan RENJA-SKPD Tahun 2025) menjadi Rp. 54.076.195.000 (pagu final di penetapan APBD Provinsi Banten TA. 2025) atau bertambah sebesar Rp. 4.942.600.000,- dimana didalamnya mencakup 2 (dua) Surat Edaran Pj. SEKDA Provinsi Banten terkait Finalisasi KUA PPAS TA. 2025 dan Finalisasi RAPBD Provinsi Banten TA. 2025. Perubahan alokasi pagu belanja tersebut mengakibatkan berubahnya target-target kinerja *output* yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RENJA-SKPD Tahun 2025.
2. Adanya kebijakan pergeseran APBD TA. 2025 sesuai Surat Edaran Pj. SEKDA Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dalam rangka Pergeseran APBD Provinsi Banten TA. 2025 dalam rangka menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dimana alokasi pagu anggaran Dinas ESDM Provinsi Banten berkurang sebesar Rp. 7.103.882.250 dibandingkan dengan alokasi pagu DPA-SKPD TA. 2025-nya, yaitu dari Rp. 54.076.195.000 menjadi Rp. 46.972.312.750,-. Perubahan alokasi pagu belanja ini juga mengakibatkan berubahnya target-target kinerja *output* yang sebelumnya telah ditetapkan dalam DPA-SKPD TA. 2025.
3. Adanya kekurangan alokasi anggaran untuk belanja pegawai, dalam hal ini alokasi gaji dan TPPNS Dinas ESDM Provinsi Banten, di DPA-SKPD TA. 2025 yang baru mengalokasikan kebutuhan 12 bulan dari seharusnya 14 bulan, yang nilai kekurangannya adalah sebesar Rp. 1.323.977.484,-
4. Penyesuaian kegiatan prioritas perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 sesuai dengan visi, misi dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka dalam rangka persiapan perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 melalui koordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten dan berpedoman pada Surat Edaran Pj. SEKDA Provinsi Banten untuk setiap tahapan proses penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah-nya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5585);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
19. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan;
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);

31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025;
36. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Perubahan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten pada tahun 2025 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan seiring dengan adanya perubahan kebijakan perencanaan pada saat pelaksanaannya di tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Perubahan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2025 adalah :

1. Menetapkan prioritas pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten pada tahun 2025 sesuai dengan kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025;

2. Menetapkan perubahan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2025 dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum yang didalamnya memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 terhadap pencapaian RENSTRA maupun realisasinya sampai dengan periode bulan Juni 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil telaahan terhadap perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025, serta uraian ringkas mengenai program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perubahan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025, antara lain mencakup perubahan pagu indikatif, penghapusan kegiatan dan/atau sub kegiatan, penambahan kegiatan/sub kegiatan baru, penambahan dan/atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan atau kelompok sasaran kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut dari hasil penyusunan dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2025 ini.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2025



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2025

2.1. REVIEW TERHADAP PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

Dalam pelaksanaannya, RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025, mengalami perubahan substansi seiring dengan dilaksanakannya penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 di akhir tahun 2025 maupun saat pelaksanaan RENJA-SKPD tersebut di periode bulan Januari-Juni 2025, baik komposisi dan jumlah anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan maupun target-target kinerja yang dicanangkannya.

Berikut adalah perubahan substansi RENJA-SKPD dimaksud, yaitu :

1. Perubahan akibat Penganggaran Tahun Anggaran 2025

Setelah ditetapkan RENJA Perangkat Daerah Provinsi Banten, terdapat perubahan substansi RENJA_SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada saat proses penganggarannya di akhir tahun 2024. Perubahan ini adalah akibat adanya revisi alokasi anggaran dari TAPD Provinsi Banten dari **Rp. 49.133.595.000,-** (pagu di RKPD Provinsi Banten dan RENJA-SKPD Tahun 2025) menjadi **Rp. 54.076.195.000,-** (pagu final di penetapan APBD Provinsi Banten TA. 2025) atau bertambah sebesar **Rp. 4.942.600.000,-** dimana didalamnya mencakup 2 (dua) Surat Edaran Pj. SEKDA Provinsi Banten terkait Finalisasi KUA PPAS TA. 2025 dan Finalisasi RAPBD Provinsi Banten TA. 2025, yaitu :

- a. Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 35 Tahun 2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penyusunan Finalisasi KUA PPAS APBD Provinsi Banten TA. 2025, dimana terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 3.942.600.000,- menjadi **Rp. 53.076.195.000,-** yang merupakan akumulasi dari pengurangan belanja pegawai sebesar Rp. 3.589.000.000,- dan penambahan untuk penguatan program sebesar Rp. 7.531.600.000;

- b. Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 58 Tahun 2024 tanggal 25 Nopember 2024 tentang Finalisasi RAPBD Provinsi Banten TA. 2025, dimana terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari Rp. 53.076.195.000,- menjadi **Rp. 54.076.195.000,-** yang merupakan penambahan alokasi anggaran penguatan program.

2. Perubahan akibat Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025

Setelah mengalami perubahan pada saat proses penganggarannya sampai dengan ditetapkannya DPA-SKPD, dalam pelaksanaannya, RENJA-SKPD Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025, juga mengalami perubahan karena adanya kebijakan pergeseran anggaran oleh TAPD Provinsi Banten yang dilaksanakan di bulan Maret 2025.

Sesuai dengan Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dalam rangka Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2025, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten mendapatkan kebijakan untuk mengurangi pagu anggaran APBD TA. 2025 sebesar **Rp. 7.103.882.250,-**, yaitu dari Rp. 54.076.195.000,- (pagu Penetapan APBD Provinsi Banten TA. 2025) menjadi Rp. 46.972.312.750,- (pagu Pergeseran APBD Provinsi Banten TA. 2025).

Pengurangan alokasi anggaran dimaksud adalah merupakan kebijakan TAPD Provinsi Banten dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam INPRES tersebut diinstruksikan, khususnya kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 7 (tujuh) point terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu :

- a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/FGD;
- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
- c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;

- d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
- g. Melakukan penyesuaian belanja APBD TA. 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Untuk menindaklanjuti 7 (tujuh) point intruksi tersebut diatas, maka berdasarkan prioritas, kebijakan dan arahan TAPD Provinsi Banten, Dinas ESDM, melaksanakan efisiensi dan pengurangan anggaran yang jumlahnya melebihi dari batasan minimal jumlah efisiensi yang ditetapkan oleh TAPD Provinsi Banten, dimana rinciannya adalah sebagai berikut, yaitu :

Tabel 2.1 Rincian efisiensi dan pengurangan APBD TA. 2025 untuk Dinas ESDM Provinsi Banten

URAIAN		JUMLAH (TAPD)	JUMLAH (OPD)	(+/-)
PAGU ANGGARAN		54.076.195.000	29.880.640.000	-
PERJADIN (SPPD) DAN PAKET MEETING	PERJADIN BIASA DAN DALAM KOTA	588.772.000	588.778.000	6.000
	PERJADIN LUAR NEGERI	-	-	-
	Paket Meeting	16.137.600	26.896.000	10.758.400
	Meeting Uang Pengganti Transport	43.470.000	50.350.000	6.880.000
PUBLIKASI- IKLAN		713.160.750	713.160.750	-
ATK, FOTOCOPY, COVER, CENDRAMATA DAN BAHAN KOMPUTER		497.104.776	193.515.600	-303.589.176
KAJIAN DAN FGD		26.205.000	394.631.900	368.426.900
MAKANAN DAN MINUMAN		174.795.000	39.900.000	-134.895.000
NARASUMBER, DLL		104.700.000	76.010.000	-28.690.000
SEWA HOTEL		-	-	-
EFISIENSI BELANJA MODAL		1.921.003.000	2.021.003.000	100.000.000
EFISIENSI BELANJA KHUSUS MBG		-	-	-
EFISIENSI PSU DAN LISDES		3.000.000.000	3.000.000.000	-
EFISIENSI BELANJA HIBAH		-	-	-
JUMLAH EFISIENSI		7.085.348.126	7.103.882.250	18.534.124

Berdasarkan penjelasan point 1 dan 2 diatas, maka perubahan alokasi anggaran pada penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (RKA-SKPD dan DPA-SKPD) dan penyusunan perubahan APBD dalam rangka Pergeseran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025, secara akumulasi mengalami penurunan sebesar **Rp. 2.161.282.250,-**, yaitu dari Rp. 49.133.595.000,- (pagu di RKPD Provinsi Banten dan RENJA-SKPD Tahun 2025) menjadi Rp. 46.972.312.750,- (pagu Pergeseran APBD Provinsi Banten TA. 2025).

Penurunan alokasi anggaran tersebut, selain mengakibatkan penurunan pagu indikatif perangkat daerah, juga mengakibatkan perubahan pagu indikatif dan target kinerja sub kegiatan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Perubahan pagu dan target kinerja RENJA Dinas ESDM pada DPA-SKPD dan Pergeseran DPA-SKPD TA. 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA-SKPD 2025		DPA-SKPD 2025		PERGESERAN DPA-SKPD 2025		SELISIH (Rp.)	PENJELASAN
		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 4	10
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 Porsen	25.902.963.000	100 Porsen	23.213.963.000	100 Porsen	22.368.967.850	-3.594.005.150	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Porsen	350.000.000	100 Porsen	350.000.000	100 Porsen	299.914.000	-50.086.000	
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	78.660.000	3 Dokumen	68.050.000	28.950.000	- Penyusunan rincian belanja - Efisiensi rincian belanja
3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.475.000	-25.000	Efisiensi rincian belanja
3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.484.000	-16.000	Efisiensi rincian belanja
3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.483.000	-17.000	Efisiensi rincian belanja
3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.485.000	-14.000	Efisiensi rincian belanja
3.29.01.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	60.000.000	16 Laporan	21.340.000	16 Laporan	20.720.000	-39.280.000	- Penyetaraan rincian belanja - Efisiensi rincian belanja
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	132.500.000	16 Laporan	132.500.000	13 Laporan	121.045.000	-11.454.000	Efisiensi rincian belanja
3.29.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data	45.500.000	1 Data	45.500.000	1 Data	27.510.000	-17.990.000	Efisiensi rincian belanja
3.29.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berta Acara	32.000.000	1 Berta Acara	32.000.000	1 Berta Acara	21.060.000	-10.940.000	Efisiensi rincian belanja
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Porsen	22.567.411.000	100 Porsen	19.068.411.000	100 Porsen	19.066.502.800	-3.599.808.200	
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	22.138.585.000	78 Orang/Bulan	18.563.585.000	78 Orang/Bulan	18.563.585.000	-3.553.000.000	Pengurangan anggaran (sesuai IJE)
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	460.710.000	12 Dokumen	424.710.000	12 Dokumen	424.705.000	-38.005.000	Penyetaraan rincian belanja
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.148.000	12 Dokumen	15.148.000	12 Dokumen	15.148.000	0	
3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.952.000	12 Dokumen	1.952.000	12 Dokumen	1.946.800	-3.200	Efisiensi rincian belanja
3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.832.000	1 Laporan	8.832.000	1 Laporan	8.832.000	0	
3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	4.980.000	1 Dokumen	4.980.000	1 Dokumen	4.080.000	-900.000	Efisiensi rincian belanja
3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/Semesteran SKPD	16 Laporan	24.200.000	18 Laporan	24.200.000	18 Laporan	24.200.000	0	
3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.004.000	2 Dokumen	5.004.000	1 Dokumen	4.104.000	-900.000	Efisiensi rincian belanja
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah	100 Porsen	5.000.000	100 Porsen	5.000.000	100 Porsen	200.000	-4.800.000	
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	200.000	-4.800.000	Efisiensi rincian belanja

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA-SKPD 2025		DPA-SKPD 2025		PERGESERAN DPA-SKPD 2025		SELISIH (Rp.)	PENJELASAN
		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 4	10
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	62.200.000	100 Persen	62.200.000	100 Persen	59.846.000	-2.354.000	
3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	0	
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.200.000	1 Dokumen	2.200.000	1 Dokumen	2.200.000	0	
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	50.000.000	6 Orang	50.000.000	6 Orang	47.646.000	-2.354.000	Efisiensi rncan belanja
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	388.380.000	100 Persen	388.380.000	100 Persen	288.983.800	-108.386.200	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	0	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	0	
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	0	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	0	
3.29.01.1.06.0006	Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	0	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	188.380.000	1 Laporan	188.380.000	1 Laporan	78.983.800	-108.386.200	Efisiensi rncan belanja
3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	0	
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	15.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	900.000	-14.400.000	
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	15.000.000	3 Unit	25.000.000	0 Unit	900.000	-14.400.000	- Pengurangan program (sesuai SE) - Efisiensi belanja - Pengurangan output
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.994.962.000	100 Persen	2.805.979.000	100 Persen	2.092.818.250	97.866.250	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	0	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.744.962.000	12 Laporan	2.555.979.000	12 Laporan	1.842.818.250	97.866.250	- Pengurangan program (sesuai SE) - Efisiensi belanja
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	420.000.000	100 Persen	488.983.000	100 Persen	498.983.000	78.983.000	
3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Diras atau Kendaraan Diras Jabatan	7 Unit	100.000.000	7 Unit	160.203.000	7 Unit	160.203.000	60.203.000	Pengurangan program (sesuai SE)
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	200.000.000	27 Unit	200.000.000	27 Unit	200.000.000	0	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41 Unit	30.000.000	39 Unit	30.000.000	39 Unit	30.000.000	0	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	0	
3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	15.000.000	2 Unit	33.780.000	-2 Unit	-33.780.000	18.780.000	Pengurangan program (sesuai SE)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA-SKPD 2025		DPA-SKPD 2025		PERGESERAN DPA-SKPD 2025		SELISIH (Rp.)	PENJELASAN
		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 4	10
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	83,20 Porsen	265.000.000	83,20 Porsen	1.115.000.000	83,20 Porsen	949.436.000	584.436.000	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 Porsen	175.000.000	100 Porsen	929.000.000	100 Porsen	844.340.000	669.340.000	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1 Dokumen	175.000.000	4 Dokumen	925.000.000	4 Dokumen	844.340.000	669.340.000	Pengujian program (sesuai SK) - Eksekusi belanja
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 Porsen	180.000.000	100 Porsen	190.000.000	100 Porsen	106.095.000	-84.904.000	
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	21 Dokumen	52.584.000	21 Dokumen	52.584.000	21 Dokumen	26.282.000	-26.282.000	Eksekusi rencana belanja
3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Peninjauan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	21 Dokumen	27.416.000	21 Laporan	27.416.000	21 Laporan	22.510.000	-4.906.000	Eksekusi rencana belanja
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	56.288.000	-53.712.000	Eksekusi rencana belanja
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	80,98 Porsen	245.484.000	80,98 Porsen	663.998.000	80,98 Porsen	643.858.000	297.374.000	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Porsen	35.000.000	100 Porsen	35.000.000	100 Porsen	25.500.000	-9.500.000	
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	6 Dokumen	35.000.000	6 Dokumen	35.000.000	6 Dokumen	25.500.000	-9.500.000	Eksekusi rencana belanja
3.29.03.1.03	Penateusahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	100 Porsen	206.484.000	100 Porsen	513.998.000	100 Porsen	417.758.000	211.274.000	
3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	6 Dokumen	42.834.000	8 Laporan	350.148.000	8 Laporan	335.838.000	293.204.000	Pengujian program (sesuai RE) - Eksekusi belanja
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Penetapan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	6 Dokumen	35.000.000	0 Dokumen	35.000.000	0 Dokumen	17.840.000	-17.160.000	Eksekusi rencana belanja
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pertijinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	128.850.000	1 Laporan	128.850.000	1 Laporan	64.080.000	-84.770.000	Eksekusi rencana belanja

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA-SKPD 2025		DPA-SKPD 2025		PERGESERAN DPA-SKPD 2025		SELISIH (Rp.)	PENJELASAN
		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 4	10
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		5.000.000		105.000.000		100.800.000	98.800.000	
3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	2 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	105.000.000	3 Dokumen	100.800.000	95.600.000	- Perizinan program (sewa BE) - Ekaswa belajar
3.29.08	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	75 Persen	3.673.396.000	75 Persen	8.197.192.000	75 Persen	6.066.413.800	2.393.017.800	
3.29.08.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerahan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam	100 Persen	3.673.396.000	100 Persen	8.197.192.000	100 Persen	6.066.413.800	2.393.017.800	
3.29.08.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	7 Unit	3.673.396.000	15 Unit	8.197.192.000	11 Unit	6.066.413.800	2.393.017.800	- Perizinan program (sewa BE) - Ekaswa belajar - Pemeliharaan dan pengurangan biaya
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		18.945.792.000		20.899.562.000		17.103.647.100	-1.842.194.900	
		90,08 Persen	175.000.000	90,08 Persen	297.480.000	90,08 Persen	229.690.000	54.690.000	
		17.000 RTB	18.770.792.000	17.000 RTB	20.899.562.000	17.000 RTB	16.673.957.100	-1.896.794.900	
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100 Persen	175.000.000	100 Persen	297.480.000	100 Persen	229.690.000	54.690.000	
3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	54.900.000	-20.100.000	Ekaswa minat belajar
3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	80 Dokumen	50.000.000	80 Dokumen	50.000.000	80 Dokumen	27.050.000	-22.950.000	Ekaswa minat belajar
3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	50.000.000	2 Laporan	172.480.000	2 Laporan	147.740.000	97.740.000	- Perizinan program (sewa BE) - Ekaswa belajar
3.29.06.1.06	Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	100 Persen	18.770.792.000	100 Persen	20.899.562.000	100 Persen	16.673.957.100	-1.896.794.900	
3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	75.752.000	9 Laporan	1.899.562.000	6 Laporan	1.469.650.100	1.398.898.100	- Perizinan program (sewa BE) - Ekaswa belajar
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	6.500 RTB	18.700.000.000	6.500 RTB	18.700.000.000	7.000 RTB	15.404.307.000	-3.295.693.000	Ekaswa minat belajar
	JUMLAH		48.133.696.000		54.078.189.000		46.672.312.790	-2.161.282.290	

Berdasarkan pada Tabel. 2.2 diatas, revisi alokasi anggaran pada penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (DPA-SKPD) dan penyusunan perubahan APBD dalam rangka Pergeseran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 tersebut juga , selain mengakibatkan penurunan alokasi pagu perangkat daerah, juga mengakibatkan perubahan pagu dan target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, sebagaimana tergambar pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Rekapitulasi perubahan pagu dan target kinerja RENJA Dinas ESDM pada DPA-SKPD TA. 2025

No	Uraian	RENJA Murni Tahun 2025	Perubahan	
			Target Kinerja	Pagu
1.	Program	5	0	5
2.	Kegiatan	16	0	16
3.	Sub Kegiatan	51	4	40

Perubahan alokasi anggaran, target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta penambahan dan pengurangan kegiatan dan sub kegiatan dari RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 akibat dinamisasi selama proses penyusunan dan pelaksanaan penganggarannya sebagaimana dijelaskan diatas, menjadi salah satu pertimbangan utama diperlukannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA), selain tentunya kebijakan perencanaan yang tercantum dalam Perubahan RKPD 2025 serta penyesuaian yang diperlukan akibat adanya penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, terutama terkait dengan visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih.

Penyesuaian kebijakan perencanaan yang tercantum dalam Perubahan RKPD 2025 adalah terkait dengan adanya program unggulan untuk mendukung pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih, dimana cakupannya adalah sebagai berikut :

1. Program Unggulan 1

Banten Bagus merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, sumber daya air, dan hunian layak.

2. Program Unggulan 2

Banten Sehat merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan akses kesehatan bagi warga tanpa diskriminasi.

3. Program Unggulan 3

Banten Cerdas merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan sekolah gratis untuk SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Provinsi Banten.

4. Program Unggulan 4

Banten Kuat merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan zona ekonomi baru, penguatan UMKM, dan pemerataan ekonomi.

5. Program Unggulan 5

Banten Indah merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

6. Program Unggulan 6

Banten Makmur merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

7. Program Unggulan 7

Banten Ramah merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan investasi, kemudahan industri dan penyerapan tenaga kerja.

8. Program Unggulan 8

Banten Melayani merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tidak korupsi dan sistem merit dalam birokrasi.

Dinas ESDM Provinsi Banten, sesuai TUPOKSI-nya, perencanaan pembangunan di tahun 2025 dalam dokumen Perubahan RENJA-nya melalui 5 (lima) programnya, yaitu:

- (1) program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
- (2) program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
- (3) program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- (4) program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
- (5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

adalah tercakup dalam Program Unggulan 4, yaitu Banten Kuat yang merupakan program prioritas pembangunan untuk mewujudkan zona ekonomi baru, penguatan UMKM, dan pemerataan ekonomi.

2.2. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Januari-Juni 2025)

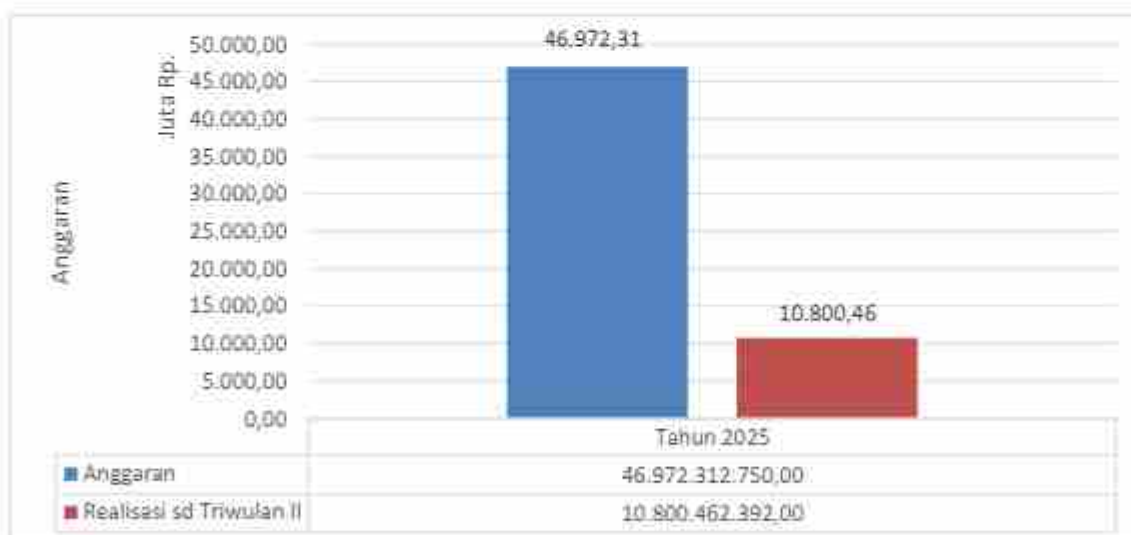
Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah adalah dikaitkan dengan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 periode Triwulan II (bulan Januari-Juni) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, baik realisasi anggaran, realiasi kinerja (IKU, IKK dan Output) serta permasalahan dan rekomendasi.

A. REALISASI ANGGARAN APBD DESDM TAHUN 2025

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh anggaran belanja APBD Murni sebesar Rp. 54.076.195.000,00,- (*Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan terbitnya SE No 6/2025 tentang Pergeseran Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, terdapat Kegiatan dan Sub kegiatan dilakukan efisiensi anggaran dan Anggaran setelah Pergeseran sebesar Rp. 46.972.312.750,- (*Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) untuk melaksanakan 3 (tiga) Indikator Sasaran IKU, 5 (lima) program dan 16 (enam belas) kegiatan.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II telah direalisasikan sebesar Rp. 10.800.462.392,00,- atau sebesar 22,99% dengan capaian realisasi fisik sebesar 15,45%.

Tabel 2.4 Grafik Realisasi pelaksanaan APBD DESDM Provinsi Banten TA. 2025 Sampai dengan Triwulan II



B. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II (satu) yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran DESDM Provinsi Banten Tahun 2025 dengan Triwulan II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN			TARGET S/D TRIWULAN II		REALISASI S/D TRIWULAN II		CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
			Indikator Kinerja (%)	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Efisiensi (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Kinerja %	Anggaran %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9/5*100)	12=(10/6*100)	13
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)	70-80	23.213.963.000	22.308.937.850	0,00	10.515.279.203	0,00	10.565.630.792	0,00	47,36	Tidak ada realisasi kinerja pada triwulanan, sesuai dengan DO nya, dapat diukur realisasinya pada akhir tahun
2.	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral (Satuan : %)	82,94	1.768.998.000	1.493.294.000	0,00	344.843.000	0,00	110.832.500,00	0,00	7,42	Tidak ada realisasi kinerja pada triwulanan, sesuai dengan DO nya, dapat diukur realisasinya pada akhir tahun
3.	Meningkatnya Pelayanan listrik dan energi terbarukan yang optimal	Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru terbarukan (%)	40,00	8.197.192.000	6.066.413.800	0,00	117.497.000	0,00	15.500.000,00	0,00	0,26	Tidak ada realisasi kinerja pada triwulanan, sesuai dengan DO nya, dapat diukur realisasinya pada akhir tahun
		Rasio Elektrifikasi (%)	99,99	20.896.042.000	17.103.647.100	0,00	523.991.000	0,00	106.499.100,00	0,00	0,63	Tidak ada realisasi kinerja pada triwulanan, sesuai dengan DO nya, dapat diukur realisasinya pada akhir tahun
JUMLAH				54.076.195.000	46.972.312.750	0,00	11.701.610.203	0,00	10.800.462.392	0,00	22,99	

Dari tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Sasaran terkait tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah 0,00%.

Berikut analisis dan penjelasan pencapaian/ketidaktercapain pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran **meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah** dengan indikator kinerja **Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Satuan : Nilai)**, target kinerja Tahun 2025 yaitu **Nilai : 70-80**. Untuk pengukuran realisasi indikator kinerja Sasaran terkait tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah masih Nol, karena berdasarkan Definsi Operasional (DO), Nilai Capaian SAKIP OPD ini diperoleh melalui Review Inspektorat Provinsi Banten dan biasa dilakukan di awal tahun berikutnya. Upaya-upaya perbaikan akan terus dilakukan diantaranya sebagai berikut :
 - a. Menggunakan informasi kinerja untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan program dan kegiatan tahun 2025. Informasi kinerja juga digunakan untuk meningkatkan kinerja di DESDM dengan didukung implemntasi SAKIP yang memadai;
 - b. Melaksanakan rapat pembahasan monitoring dan evalausi pencapaian kinerja secara berkala setiap triwulan terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan dengan menghadirkan semua PPTK serta menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evalausi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, mengumpulkan bukti kenerja secara handal, menggunakan apliaksi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SIMAKIP).
2. Sasaran **meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral** dengan indikator kinerja **Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral (Satuan : %)**, target kinerja Tahun 2025 yaitu **82,94%**. Untuk pengukuran realisasi indikator kinerja Sasaran terkait tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah Nol, karena Capaian Sasaran Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral perhitungannya akan diakumulasi pada Triwulan Akhir tahun.

IKU Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan II di pelaksanaan kegiatannya masih pada tahap persiapan pemilihan penyedia barang/jasa Konsultansi Zona Konservasi kerentanan gerakan tanah di sebagian kabupaten Lebak, Serang, Konsultansi Zona Konservasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi, dan sudah tercapai target kegiatan terkait Rekomendasi Teknis Perizinan Air Tanah .

Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam mewujudkan Sasaran meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral pada tahun 2025 diatas adalah melalui :

- a. Pelayanan perusahaan pertambangan MINERBA dan Air Tanah melalui penerbitan Rekomendasi Teknis, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan
 - b. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pembinaan perusahaan pertambangan MINERBA dan Air Tanah;
 - c. Pengendalian dan pembinaan Penambang Tanpa Ijin (PETI);
 - d. Pengembangan potensi dan penyediaan sumber data MINERBA, Air Tanah, Geowisata, dan Mitigasi Bencana;
 - e. Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang MINERBA, Geologi dan Air Tanah, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan unsur swasta selaku pelaku usaha, investor, maupun penyedia IPTEK.
 - f. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan good mining practice, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang MINERBA, Geologi dan Air Tanah terkini, serta peningkatan kompetensi aparatur teknis terkait.
3. Sasaran **meningkatnya pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal** dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
- a. **Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru terbarukan (Satuan: %)** dengan target kinerja Tahun 2025 yaitu 40%. Berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja Sasaran terkait untuk tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0%, karena Capaian Sasaran IKU Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru terbarukan (%) perhitungannya akan diakumulasi pada Triwulan Akhir.

IKU Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan sampai dengan Triwulan II di pelaksanaan kegiatannya masih pada tahap persiapan pemilihan penyedia barang/jasa Konsultansi Penyusunan FS Potensi Aneka EBT pemanfaatan limbah Jerami.

- b. Rasio Elektrifikasi (%) dengan target kinerja Tahun 2025 yaitu 99,99%. Berdasarkan hasil pengukuran indikator Rasio Elektrifikasi Sampai dengan tahun 2024, Rasio Elektrifikasi Banten telah mencapai 99,99%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 99,78% sesuai Press Release Kementerian ESDM tanggal 18 Januari 2024. Hasil pembangunan listrik perdesaan melalui APBD Provinsi Banten maupun yang dilaksanakan oleh Pusat (APBN), tidak menyebabkan kenaikan Rasio Elektrifikasi, karena sasaran terpasangnya listrik perdesaan tersebut adalah untuk menangani Rumah Tangga Berlistrik dengan Listrik PLN (Non KWH), dimana kondisinya yang tersisa di tahun 2024 sebesar 40.661 RTS.

Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam mewujudkan Sasaran meningkatnya pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal pada tahun 2025 diatas adalah melalui :

- a. Pembangunan listrik perdesaan dan pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan (PLTS Rooftop);
- b. Penyusunan perencanaan dan kajian teknis di bidang ketenagalistrikan;
- c. Pelayanan perusahaan ketenagalistrikan melalui penerbitan Rekomtek Ketenagalistrikan, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan
- d. Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang ketenagalistrikan, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan PT. PLN (persero) selaku *leading sector* penyedia infrastruktur ketenagalistrikan.
- e. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan konservasi energi (penggunaan energi hemat, penggunaan energi alternatif), ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi aparatur di bidang ketenagalistrikan.

C. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Realisasi anggaran dan capaian kinerja Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II (dua) yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja Program DESDM Provinsi Banten Tahun 2025 dengan Triwulan II

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN			TARGET 5/D TRIWULAN II		REALISASI 5/D TRIWULAN II		CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN		KETERANGAN
			Indikator Kinerja	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Efisiensi (Rp.)	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Anggaran (%)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100,00	25.215.963.000	22.308.957.850	45,89	10.515.179.203	43,46	10.365.650.792	43,46	47,36	Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di Triwulan I tidak tercapai karena pada pembentuk capaian target Program terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dikarenakan keterlambatan dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Dokumen untuk pemilihan penyedia barang/jasa melalui mekanisme SPBE dan e-Purchase telah dipersiapkan oleh masing-masing kegiatan di Sekretariat. Diantaranya Dokumen perisipan pemilihan penyedia Jasa Asuransi Kendaraan Dinas dan Jasa Konsultan Survey Kepuasan Masyarakat.
2.	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Presentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)	70,89	1.115.000.000	949.436.000	0,00	218.304.000	0,00	49.347.500	0,00	5,20	Tidak ada realisasi kinerja pada triwulan, sesuai dengan DO nya, dapat diukur realisasinya pada akhir tahun. Sampai dengan Triwulan I pembentuk target Program Pengelolaan Aspek Kegeologian di kegiatan sedang dalam tahapan pelaksanaan Jasa Konsultansi Zona Konservasi kerentanan gerakan tanah di sebagian kabupaten Latak, Serang, Konsultansi Zona Konservasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi, dan target kegiatan terkait Rekomendasi Teknis Pemisahan Air Tanah sudah tercapai.
3.	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Presentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (%)	63,79	653.998.000	543.858.000	0,00	326.559.000	0,00	61.485.000	0,00	11,31	Tidak ada realisasi kinerja pada triwulan, sesuai dengan DO nya, dapat diukur realisasinya pada akhir tahun. Target pembentuk Program Pengelolaan Mineral pada kegiatan sampai dengan Triwulan I sudah dalam tahap pelaksanaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Teknis Pengelolan WPR di Kab. Latak, Penyusunan Pedoman dan Tatacara Perhitungan Dana Jaminan Reklamasi, Penyusunan Pedoman dan Tatacara Perhitungan Dana Jaminan Pascatambang, Penyusunan Naskah Akademik Kep. Gub. Banten Tentang Penetapan Harga Patokan MBLB dan Target terkait Rekomendasi Teknis sudah tercapai.

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN			TARGET S/D TRIWULAN II		REALISASI S/D TRIWULAN II		CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN		KETERANGAN
			Indikator Kinerja	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Efisiensi (Rp.)	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Anggaran (%)	
4.	PENGLOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)	42,88	8.197.192.000	6.066.413.800	0,00	117.497.000	0,00	15.500.000	0,00	0,26	Tidak ada realisasi kinerja pada triwulan, sesuai dengan DO nya, dapat diukur realisasinya pada akhir tahun. Target pembentuk Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan pada kegiatan sampai dengan Triwulan 2 masih pada tahap persiapan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa Pembangunan PLTS Atap di Gedung QPD Provinsi Banten dan SMK.
5.	PROGRAM PENGLOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)	3.500 Rumah Tangga Sasaran (RTS)	20.598.552.000	16.873.957.100	0,00	569.131.000	0,00	53.584.850	0,00	0,35	Tidak ada realisasi kinerja pada triwulan, sesuai dengan DO nya, dapat diukur realisasinya pada akhir tahun. Target pembentuk Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan indikator Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS) pada kegiatan sampai dengan Triwulan 2 dalam tahap pelaksanaan Paket pekerjaan pemasangan Instalasi Rumah (IR) di WKP 1 Wilayah Tangerang, WKP 2 Wilayah Serang dan
		Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (%)	83,42	297.490.000	229.690.000	0,00	154.960.000	0,00	52.914.250	0,00	23,04	Tidak ada realisasi kinerja pada triwulan, sesuai dengan DO nya, dapat diukur realisasinya pada akhir tahun. Target pembentuk Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan indikator Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar pada kegiatan sampai dengan Triwulan 2 masih pada tahap persiapan dokumen pelaksanaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIDAK Banten dan target terkait rekomendasi teknis tercapai.
RATA-RATA CAPAIAN DAN JUMLAH				54.076.195.000	46.972.312.750	0,00	11.701.610.203	43,46	10.600.462.392	43,46	21,99	

Dari Tabel 2.6 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Program terkait tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah 43,46%.

Berikut analisis dan penjelasan pencapaian/ketidaktercapain pada Indikator Kinerja Program yaitu sebagai berikut:

1. Realisasi indikator kinerja program capaian **Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)** berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja Program terkait untuk tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar **43,89%** dari target **100,00% di akhir tahun 2025**. Dengan terbitnya SE No 6/2025 tentang Pergeseran Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, terdapat Kegiatan dan Sub kegiatan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di Triwulan II tidak bisa dilaksanakan karena adanya efisiensi yang mengurangi pagu anggaran seluruh kegiatan sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan terkendala proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui mekanisme e Purchase. Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di Triwulan 2 tidak tercapai karena pada pembentuk capaian target Program terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dikarenakan keterlambatan dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Dokumen untuk pemilihan penyedia barang/jasa melalui mekanisme SPSE dan e-Purchase telah dipersiapkan oleh masing-masing kegiatan di Sekretariat. Diantaranya Dokumen perispan pemilihan penyedia Jasa Asuransi Kendaraan Dinas dan Jasa Konsultan Survey Kepuasan Masyarakat.
2. Realisasi indikator kinerja program capaian **Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (Satuan : %)** berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja Program terkait untuk tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar **0,00 %** dari target **70,89% di akhir tahun 2025**. Sampai dengan Triwulan II pembentuk target Program Pengelolaan Aspek Kegeologian di kegiatan sedang dalam tahapan persiapan Pengelolaan Aspek Kegeologian di kegiatan sedang dalam tahapan pelaksanaan Jasa Konsultansi Zona Konservasi kerentanan gerakan tanah di sebagian kabupaten Lebak, Serang, Konsultansi Zona Konservasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi, dan target kegiatan terkait Rekomendasi Teknis Perizinan Air

Tanah sudah tercapai dan Dengan terbitnya SE No 6/2025 tentang Pergeseran Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, terdapat Kegiatan dan Sub kegiatan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di Triwulan II tidak bisa dilaksanakan karena adanya efisiensi yang mengurangi pagu anggaran.

3. Realisasi indikator kinerja program capaian **Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (Satuan : %)** berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja Program terkait untuk tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar **0,00 %** dari target **63,79% di akhir tahun 2025**. Target pembentuk Program Pengelolaan Mineral dan Batubara pada kegiatan sampai dengan Triwulan II masih tahap pelaksanaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Teknis Pengelolaan WPR di Kab. Lebak, Penyusunan Pedoman dan Tatacara Perhitungan Dana Jaminan Reklamasi, Penyusunan Pedoman dan Tatacara Perhitungan Dana Jaminan Pascatambang, Penyusunan Naskah Akademik Kep. Gub. Banten Tentang Penetapan Harga Patokan MBLB dan Target terkait Rekomendasi Teknis sudah tercapai dan dengan terbitnya SE No 6/2025 tentang Pergeseran Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, terdapat Kegiatan dan Sub kegiatan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di Triwulan II tidak bisa dilaksanakan karena adanya efisiensi yang mengurangi pagu anggaran.
4. Realisasi indikator kinerja program capaian **Cakupan Ketersediaan Informasi Potensi Dan Pelayanan Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan (Satuan : %)** berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja Program terkait untuk tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah masih **0,00%** dari target **40% di akhir tahun 2025**. Target pembentuk Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan pada kegiatan sampai dengan Triwulan 2 masih pada tahap persiapan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa Pembangunan PLTS Atap di Gedung OPD Provinsi Banten dan SMK dan dengan terbitnya SE No 6/2025 tentang Pergeseran Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, terdapat Kegiatan dan Sub kegiatan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di Triwulan II tidak bisa dilaksanakan karena adanya efisiensi yang mengurangi pagu anggaran.

5. Realisasi indikator kinerja program capaian **Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Satuan : RTS)** berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja Program terkait tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah masih **0 RTS** dari target **7.000 di akhir tahun 2025** karena kegiatan/sub kegiatan terkait pembentuk indicator kinerja dari program ini baru dalam tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan.
6. Realisasi indikator kinerja program capaian **Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (Satuan : %)** berdasarkan hasil pengukuran realisasi indikator kinerja Program terkait untuk tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar **0,00%** dari target **83,42% di akhir tahun 2025** karena kegiatan/sub kegiatan terkait pembentuk indicator kinerja dari program ini baru dalam tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan.

D. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II (dua) yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.7

Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Output) DESDM Provinsi Banten Tahun 2025 dengan Triwulan II

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Target s/d Triwulan II		Realisasi s/d Triwulan II		Capaian Terhadap Target Triwulan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output (%)	Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				46.972.112.700,00		11.597.486.203,00		10.600.462.392,00		22,89
3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				22.308.937.870,00		10.499.339.203,00		10.565.638.792,00		47,36
3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	38,00	299.914.000,00	11,00	101.233.000,00	11,00	29.680.500,00	100,00	-9,90
3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)		3,00	68.850.000,00	0,00	24.275.000,00	0,00	3.662.500,00	0,00	5,32
3.29.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)		1,00	12.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)		1,00	12.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1,00	7.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA		1,00	7.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		16,00	20.720.000,00	6,00	9.330.000,00	6,00	1.290.000,00	100,00	6,23
3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)		13,00	121.046.000,00	4,00	18.260.000,00	4,00	3.520.000,00	100,00	2,91
3.29.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lengkap Perangkat Daerah (Satuan: Data)		1,00	27.510.000,00	0,00	27.510.000,00	0,00	6.318.000,00	0,00	22,97
3.29.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Berita Acara)		1,00	21.860.000,00	1,00	21.860.000,00	1,00	14.890.000,00	100,00	68,12
3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				79.066.602.900,00		8.492.898.583,00		9.483.542.722,00		49,74
3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang)		12,00	18.383.385.000,00	6,00	8.274.542.700,00	6,00	9.318.549.971,00	100,00	7,00
3.29.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)		12,00	424.703.000,00	4,00	176.877.083,00	6,00	126.480.000,00	100,00	3,00
3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)		12,00	15.148.000,00	6,00	10.882.000,00	6,00	8.573.750,00	100,00	56,60
3.29.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		2,00	1.948.000,00	1,00	1.800.000,00	1,00	1.755.000,00	100,00	90,06
3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1,00	8.832.000,00	1,00	4.332.000,00	1,00	4.259.900,00	100,00	48,23
3.29.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)		4,00	4.080.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.735.000,00	0,00	43,01
3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/		16,00	24.200.000,00	6,00	20.863.000,00	6,00	20.414.200,00	100,00	84,36
3.29.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)		4,00	4.104.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.755.000,00	0,00	42,76

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Target s/d Trivulan II		Realisasi s/d Trivulan II		Capaian Terhadap Target Trivulan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output (%)	Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	2,00	200.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)		2,00	200.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	8,00	59.846.000,00	4,00	36.832.000,00	4,00	21.897.400,00	100,00	36,59
3.29.01.1.05.0002 Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)		1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	9.877.400,00	100,00	98,77
3.29.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)		1,00	2.200.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00		0,00
3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)		6,00	47.646.000,00	3,00	25.732.000,00	3,00	12.020.000,00	100,00	25,23
3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	9,00	289.983.800,00	0,00	198.233.400,00	0,00	62.236.455,00	0,00	21,46
3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		1,00	25.000.000,00	0,00	14.744.000,00	0,00	12.168.000,00	0,00	48,67
3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Pedengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pedengkapan Kantor yang Disediakan		2,00	100.000.000,00	0,00	43.609.400,00	0,00	18.159.190,00	0,00	18,16
3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)		1,00	30.000.000,00	0,00	11.199.000,00	0,00	6.157.500,00	0,00	20,53
3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1,00	10.000.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	1956940,00	0,00	19,57
3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)		1,00	15.000.000,00	0,00	7.415.000,00	0,00	2452500,00	0,00	16,35
3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)		1,00	79.993.800,00	0,00	104.056.000,00	0,00	12.842.325,00	0,00	16,05
3.29.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)		2,00	30.000.000,00	0,00	13.510.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	28,33
3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	3,00	600.000,00	0,00	24.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)		3,00	600.000,00	0,00	24.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	34,00	2.092.818.250,00	12,00	1.380.703.720,00	12,00	851.608.716,00	100,00	40,69
3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)		12,00	250.000.000,00	6,00	124.925.000,00	6,00	67.372.344,00	100,00	26,95
3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		12,00	1.842.818.250,00	6,00	1.235.778.720,00	6,00	784.237.372,00	100,00	42,56

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Target s/d Triwulan II		Realisasi s/d Triwulan II		Capaian Terhadap Target Triwulan			
		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	75,00	498.983.000,00	20,00	260.385.500,00	17,00	116.664.000,00	85,00	23,38		
3.29.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)		6,00	160.203.000,00	5,00	72.891.000,00	3,00	45.577.000,00	100,00	28,45		
3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan (Satuan: Unit)		17,00	208.000.000,00	6,00	84.862.500,00	6,00	58.977.000,00	100,00	29,49		
3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)		39,00	30.000.000,00	8,00	12.677.000,00	8,00	12.110.000,00	100,00	48,57		
3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)		1,00	73.000.000,00	1,00	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.29.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)		2,00	33.780.000,00	2,00	14.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						949.456.000,00		130.220.000,00		49.347.500,00		5,20
3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Persen)	100,00	4,00	844.340.000,00	0,00	130.220.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,81		
3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)		4,00	844.340.000,00	0,00	130.220.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,81		
3.29.02.1.05 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Persen)	100,00	43,00	103.096.000,00	10,00	88.064.000,00	10,00	42.547.500,00	100,00	40,48		
3.29.02.1.05.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Satuan: Dokumen)		11,00	26.292.000,00	6,00	22.070.000,00	6,00	12.530.000,00	100,00	47,62		
3.29.02.1.05.0002 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Satuan: Laporan)		21,00	22.516.000,00	4,00	6.800.000,00	4,00	4.977.500,00	100,00	22,11		
3.29.02.1.05.0003 Pengeredahan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Satuan: Laporan)		1,00	56.288.000,00	0,00	59.234.000,00	0,00	25.050.000,00	0,00	44,50		
3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						543.858.000,00		326.539.000,00		61.485.000,00		11,31
3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai (Persen)	100,00	6,00	25.500.000,00	2,00	8.660.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	17,65		
3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Satuan: Dokumen)		6,00	25.500.000,00	2,00	8.660.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	17,65		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Target s/d Trivulan II		Realisasi s/d Trivulan II		Capaian Terhadap Target Trivulan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output (%)	Anggaran (%)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.01.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (%)	100,00	15,00	417.738.000,00	1,00	112.929.000,00	1,00	55.065.000,00	100,00	12,70
3.29.01.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Satuan: Laporan)		8,00	335.838.000,00	0,00	226.989.000,00	0,00	6.055.000,00	0,00	1,80
3.29.01.1.01.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha (Satuan: Dokumen)		6,00	17.840.000,00	1,00	21.970.000,00	1,00	15.510.000,00	100,00	86,94
3.29.01.1.01.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha (Satuan: Laporan)		1,00	64.080.000,00	0,00	63.990.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	-49,16
3.29.01.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan	100,00	3,00	100.800.000,00	0,00	4.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	1,90
3.29.01.1.04.0003 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Satuan: Dokumen)		3,00	100.800.000,00	0,00	4.920.000,00	0,00	3.920.000,00	0,00	3,90
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				6.066.413.800,00		117.497.000,00		15.500.000,00		0,26
3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan tekanan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan tekanan air, gerakan dan perbedaan suhu lapis (%)	100,00	15,00	6.066.413.800,00	0,00	117.497.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,26
3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (Satuan: unit)		15,00	6.066.413.800,00	0,00	117.497.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,26
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETINAGALISTRIKAN				17.103.647.108,00		523.991.000,00		108.499.100,00		0,63
3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perizinan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perizinan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Persen)	100,00	85,00	229.690.000,00	49,00	154.860.000,00	49,00	52.914.250,00	100,00	23,04
3.29.06.1.01.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perizinan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perizinan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)		3,00	54.900.000,00	1,00	39.440.000,00	1,00	26.012.500,00	100,00	47,38

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Target s/d Triwulan II		Realisasi s/d Triwulan II		Capaian Terhadap Target Triwulan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output (%)	Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)		80,00	27.030.000,00	48,00	22.040.000,00	43,00	9.280.500,00	100,00	34,31
3.29.06.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Satuan: Laporan)		2,00	147.740.000,00	0,00	93.380.000,00	0,00	17.621.250,00	0,00	11,93
3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	100,00	8509,00	16.873.937.100,00	0,00	369.131.000,00	0,00	55.584.850,00	0,00	0,33
3.29.06.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Satuan: Laporan)		9,00	1.469.650.100,00	0,00	23.932.500,00	0,00	13.106.600,00	0,00	0,89
3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Satuan: Unit)		8.500,00	15.404.307.000,00	0,00	343.179.000,00	0,00	42.478.250,00	0,00	0,28
JUMLAH			8.904,00	46.972.312.750,00	135,00	11.597.456.203,00	130,00	10.806.462.392,00	96,30	93,13

Dari Tabel 2.7 diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja seluruh Sub Kegiatan tahun 2025 sebanyak 51 sub kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 96,30% dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 93,13% berdasarkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang ditampilkan di tabel tersebut, dari 51 sub kegiatan, mayoritas telah dapat melaksanakan target realisasi *output*-nya dan hanya ada 3 (tiga) sub kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam ROK. Hasil asistensi dan koordinasi dengan unit kerja pelaksana kegiatan terkait, ketiga sub kegiatan yang belum mencapai target di Triwulan II tersebut adalah lebih disebabkan karena belum selesainya kegiatan terkait dengan penyiapan dokumen pengadaan barang/jasa-nya sesuai waktu yang direncanakan dan bukan karena adanya permasalahan substansial yang dapat menyebabkan *output* tersebut tidak dapat dilaksanakan.

E. PERMASALAHAN

1. Dengan terbitnya SE No 6/2025 tentang Pergeseran Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, terdapat Kegiatan dan Sub kegiatan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di Triwulan I dan Triwulan II tidak bisa dilaksanakan karena adanya efisiensi;
2. Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di Triwulan II tidak tercapai karena pada pembentuk capaian target Program terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dikarenakan kendala proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui mekanisme e Purchase;
3. Untuk Monitoring dan Pengendalian Air Tanah dengan target 5 kali hanya terealisasi 3 kali, karena anggaran untuk perjalanan dinas tersebut terkena efisiensi.
4. Untuk Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Lides dihapus/efisiensi sampai 0 (nol), sehingga tidak ada realisasi fisik dan keuangan, sedangkan Pelaksanaan Kegiatan pendukung Penyusunan Data Verifikasi Lides untuk Tahun 2026 dan Pemasangan IR dan SR berjalan sesuai rencana.
5. Untuk Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan

Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan sampai dengan Triwulan II masih pada tahap persiapan kegiatan dimana Paket pekerjaan pemasangan Instalasi Rumah (IR) sudah terkontrakan pertanggal 23 Juni 2024 dengan durasi waktu pekerjaan selama 120 Hari Kalender dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2025.

F. REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT

1. Penyesuaian anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai Anggaran setelah efesensi;
2. Mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa melalui mekanisme e-Purchase telah dikoordinasikan dengan Biro Barjas dan LPSE, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa konsultan individu penyusunan RENSTRA DESDM Provinsi Banten Tahun 2025 melalui mekanisme e-Purchase sudah dapat dilaksanakan pada bulan berikutnya;
3. Untuk yang terkena dampak dari efisiensi anggaran, kinerja pada anggaran perubahan akan di bobot ulang.
4. Memverifikasi time schedule pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dengan memperhatikan waktu penyelesaian dokumen keuangan serta pencairan dana agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan pada masing-masing Triwulan.
5. Meningkatkan komunikasi secara berjenjang dari pejabat pelaksana sampai dengan Pimpinan agar target kinerja dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
6. Dalam pelaksanaan kegiatan kepada Para Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK untuk lebih memperhatikan dan mengacu pada Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Umum Pengadaan Barang (RUP) yang telah dibuat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mempercepat realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah tertuang dalam ROK/Anggaran kas yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian kinerja.

2.2.2 Evaluasi Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dikaitkan dengan hasil review pelaksanaan program dan kegiatan dalam RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas ESDM Tahun 2024, serta prakiraan capaian pelaksanaan RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025 berdasarkan Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Hasil review capaian tahun 2024 dan prakiraan capaian tahun 2025 kemudian diperbandingkan capaiannya terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RENSTRA Dinas ESDM Tahun 2023-2026 untuk target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan tahun 2025 menggunakan tabel analisis yang terdapat dalam Lampiran PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017, sehingga diperoleh pokok-pokok pikiran analisis sebagai berikut, yaitu :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Di bawah ini diperlihatkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025 diperbandingkan dengan target-targetnya di dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel. 2.8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Banten dan Pencapaian Renstra ESDM Provinsi Banten sampai dengan Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PENDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN 2025	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100	9	10	11 = (10/4) x 100
3	URUSAN / PILHAN									
3.29	BIDANG URUSAN : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
3.29.01	A PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penertask Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.29.01.01	1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penertask Ketercapaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.29.01.01.0001	1.1 Sub kegiatan : Penyusunan, Dokumen, Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	67,00%
3.29.01.01.0002	1.2 Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	5 Dokumen	62,50%
3.29.01.01.0003	1.3 Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	5 Dokumen	82,00%
3.29.01.01.0004	1.4 Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan OPA-SKPD	Jumlah Dokumen OPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen OPA-SKPD	9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	5 Dokumen	62,50%
3.29.01.01.0005	1.5 Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan OPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan OPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan OPA-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	5 Dokumen	82,00%
3.29.01.01.0006	1.6 Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	18 Laporan	40 Laporan	83,33%
3.29.01.01.0007	1.7 Sub kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	12 Laporan	15 Laporan	100,00%
3.29.01.01.0008	1.8 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sistem Daerah	Jumlah Data Statistik Sistem Daerah yang Telah Diupload dan Diproses Lintas Perangkat Daerah	2 Data	0 Data	0 Data	0 Data	0,00%	1 Data	1 Data	50,00%
3.29.01.01.0009	1.9 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berkoordinasi Bidang Urusan yang Dapat dilaksanakan Melalui Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berkoordinasi Bidang Urusan yang Dapat dilaksanakan Melalui Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	0 Berita Acara	0 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00%	1 Berita Acara	1 Berita Acara	50,00%
3.29.01.02	2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penertask Ketercapaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.29.01.02.0001	2.1 Sub kegiatan : Penyediaan Sja dan Tanggapan ASN	Jumlah Orang yang Memiliki Sja dan Tanggapan ASN	228 Orang/bulan	82 Orang/bulan	76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	100,00%	76 Orang/bulan	228 Dokumen	72,86%
3.29.01.02.0002	2.2 Sub kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	36 Dokumen	75,00%
3.29.01.02.0003	2.3 Sub kegiatan : Perencanaan, Pencahayaan, dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pencahayaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	36 Dokumen	75,00%
3.29.01.02.0004	2.4 Sub kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pencahayaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	36 Dokumen	75,00%
3.29.01.02.0005	2.5 Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Dokumen	75,00%
3.29.01.02.0006	2.6 Sub kegiatan : Pengelompokan dan Penyajian Bahan Tanggapan Penertask dan Tidak Layak Penertask	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Penertask dan Tidak Layak Penertask	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Dokumen	75,00%
3.29.01.02.0007	2.7 Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/ Semester SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/ Semester SKPD	72 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100,00%	16 Laporan	64 Dokumen	75,00%
3.29.01.02.0008	2.8 Sub kegiatan : Penyusunan, Pelaporan, dan Analisis Progress Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Dokumen	75,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN 2025	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100	9	10	11 = (10/4) x 100
3.25.01.1.01	3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perentase terlaksananya implementasi administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.25.01.1.01.0001	3.1 Sub-kegiatan : Penyusunan, Pemeliharaan, dan Inventarisasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pelanggaran Tatakelola Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	6 Dokumen	75,00%
3.25.01.1.01.0002	3.2 Sub-kegiatan : Penghapusan (Barang Milik Daerah SKPD)	Jumlah Dokumen Penghapusan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3,00%	6 Dokumen	1 Dokumen	25,00%
3.25.01.1.01.0004	3.3 Sub-kegiatan : Pemeliharaan / Pengadaan dan Peningkatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan, Pengadaan dan Peningkatan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	1 Dokumen	25,00%
3.25.01.1.01.0005	3.4 Sub-kegiatan : Rekonstruksi dan Perbaikan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonstruksi dan Perbaikan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	3 Laporan	2 Dokumen	90,00%
3.25.01.1.01.0004	3.5 Sub-kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	3,00%	0 Laporan	1 Dokumen	100,00%
3.25.01.1.01	4. Kegiatan : Administrasi Kepegakeran Perangkat Daerah	Perentase terlaksananya administrasi kepegakeran perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.25.01.1.01.0002	4.1 Pengadaan Fasilitas Dasar Bersama (MBA) Kelengkapan	Jumlah Paket Fasilitas Dasar Bersama (MBA) Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	4 Dokumen	200,00%
3.25.01.1.01.0003	4.2 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegakeran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegakeran	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0 Dokumen	2 Dokumen	80,00%
3.25.01.1.01.0004	4.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegakeran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegakeran	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
3.25.01.1.01.0005	4.4 Monitoring, Evaluasi, dan Pembekal Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pembekal Kinerja Pegawai	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%
3.25.01.1.01.0006	4.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Sembako) Tugast dan Fungsi	Jumlah Pegawai (Sembako) Tugast dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	8 Orang	6 Orang	6 Orang	100,00%	0 Orang	18 Dokumen	90,00%
3.25.01.1.01.0010	4.6 Sosialisasi Pembekal Penunjang Urusan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pembekal Penunjang Urusan	100 Orang	9 Orang	6 Orang	6 Orang	3,00%	9 Orang	0 Dokumen	3,00%
3.25.01.1.01	5. Kegiatan : Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Perentase terlaksananya Administrasi Urusan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.25.01.1.01.0001	5.1 Penyediaan Kumpulan Indeks / Lembar Peringatan Bergambar Kantor	Jumlah Paket kumpulan indeks / Lembar Peringatan Bergambar Kantor yang Dihasilkan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Dokumen	75,00%
3.25.01.1.01.0002	5.2 Penyediaan Perilamb dan Peringatan Kantor	Jumlah Paket Perilamb dan Peringatan Kantor yang Dihasilkan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Dokumen	75,00%
3.25.01.1.01.0003	5.3 Penyediaan Perilamb KUBAT Tempel	Jumlah Paket Perilamb KUBAT Tempel yang Dihasilkan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Dokumen	75,00%
3.25.01.1.01.0004	5.4 Penyediaan Stempel Cetak dan Penggantian	Jumlah Paket Stempel Cetak dan Penggantian yang Dihasilkan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Dokumen	75,00%
3.25.01.1.01.0005	5.5 Fasilitas Kumpulan Teks	Jumlah Laporan Fasilitas Kumpulan Teks	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Dokumen	75,00%
3.25.01.1.01.0006	5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas (SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas (SKPD)	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Dokumen	75,00%
3.25.01.1.01.0010	5.7 Pencahayaan Ruang Kantor pada SKPD	Jumlah Dokumen Pencahayaan Ruang Kantor pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	3 Laporan	2 Dokumen	50,00%
3.25.01.1.01.0011	5.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	75,00%
3.25.01.1.01	6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.25.01.1.01.0001	6.1 Pengadaan Kebutuhan Perorangan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kebutuhan Perorangan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan yang Dihasilkan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%	0 Unit	0 Dokumen	0,00%
3.25.01.1.01.0002	6.2 Pengadaan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dihasilkan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%	0 Unit	0 Dokumen	0,00%
3.25.01.1.01.0003	6.3 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dihasilkan	4 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	0 Paket	6 Dokumen	100,00%
3.25.01.1.01.0004	6.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dihasilkan	42 Unit	47 Unit	42 Unit	42 Unit	380,00%	0 Unit	207 Dokumen	517,00%
3.25.01.1.01.0005	6.5 Pengadaan Gedung Hantar atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihasilkan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	7 Unit	0,00%	0 Unit	7 Dokumen	380,00%
3.25.01.1.01.0010	6.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihasilkan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%	0 Unit	0 Dokumen	0,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PENDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (O/UTCOME / KEGIATAN (O/TPU))	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN 2025		
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100	9	10	11 = (10/4) x 100	
3.25.01.1.07.0012	6.7	Pengawasan Teknik dan Pemasangan Pembuluh Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Pemasangan Pembuluh Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihasilkan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%	0 Unit	0 Unit	0,00%
3.25.01.1.08	7	Kegiatan : Penyelidikan Jasa Perancang Untuk Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyelidikan Jasa Perancang Untuk Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.25.01.1.08.0001	7.1	Penyediaan Jasa Survei Menyangkut	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Survei Menyangkut	49 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
3.25.01.1.08.0002	7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya In dan Lainnya yang Dihasilkan	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya In dan Lainnya yang Dihasilkan	49 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
3.25.01.1.08.0004	7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan untuk Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan untuk Kantor yang Dihasilkan	49 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
3.25.01.1.09	8	Kegiatan : Pemeliharaan Gedung M&A Daerah Perancang Untuk Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Gedung M&A Daerah Perancang Untuk Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.25.01.1.09.0001	8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kertanaka, Perencanaan, Desain, atau Kerdakan Otak Otak	Jumlah Dokumen Perancangan Otak atau Kerdakan Otak Otak yang Dipelihara dan Ditayangkan Pajanya	24 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%	0 Unit	0 Unit	0,00%
3.25.01.1.09.0002	8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perencanaan Kerdakan Otak, Otak Otak atau Lainnya	Jumlah Dokumen Otak Otak Otak atau Lainnya yang Dipelihara dan Ditayangkan Pajanya	118 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%	0 Unit	0 Unit	0,00%
3.25.01.1.09.0005	8.3	Pemeliharaan Perlatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Perlatan dan Meubel Lainnya yang Dipelihara	801 Unit	118 Unit	124 Unit	124 Unit	100,00%	38 Unit	282 Dokumen	88,00%
3.25.01.1.09.0009	8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	50,00%	1 Unit	0 Dokumen	25,00%
3.25.01.1.09.0010	8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pemasangan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Pemasangan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	9 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00%	2 Unit	0 Dokumen	88,00%
3.25.01.1.09.0011	8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pemasangan Pembuluh Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Pemasangan Pembuluh Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%	0 Unit	0 Dokumen	0,00%
3.25.02	9	PROGRAM / RENCANA ASPEK KECERDASAN	Persentase Ketercapaian Kebijakan Informatika dan Pengendalian Akses Berbasis Data di Tahun	85,31 %	57,71 %	79,89 %	68,51 %	80,85%	83,20 %	83,20 %	87,11%
3.25.02.1.01	9	Kegiatan : Penetapan Zona Komersial Air Tanah pada Cakupan Air Tanah dalam Daerah Provisi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Zona Komersial Air Tanah pada Cakupan Air Tanah dalam Daerah Provisi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.25.02.1.01.0001	9.1	Pengumpulan dan Registrasi Data Zona Komersial Air Tanah pada Cakupan Air Tanah dalam Daerah Provisi	Jumlah Dokumen Teknik Data Zona Komersial Air Tanah pada Cakupan Air Tanah dalam Daerah Provisi	24 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	13 Dokumen	84,17%
3.25.02.1.01	10	Kegiatan : Penetapan Wila Perumahan Air Tanah dalam Daerah Provisi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Zona Komersial Air Tanah pada Cakupan Air Tanah dalam Daerah Provisi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.25.02.1.01.0001	10.1	Pengumpulan dan Registrasi Data dan Informasi Wila Perumahan Air Tanah dalam Daerah Provisi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wila Perumahan Air Tanah dalam Daerah Provisi yang Terpenuhi	34 Dokumen	30 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	100,00%	21 Dokumen	72 Dokumen	88,71%
3.25.02.1.01.0002	10.2	Pengembangan, Penetapan dan Penetapan Wila Perumahan Air Tanah dalam Daerah Provisi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan, Penetapan dan Penetapan Wila Perumahan Air Tanah dalam Daerah Provisi	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Dokumen	75,00%
3.25.02.1.01.0003	10.3	Pengendalian dan Pengawasan Perumahan Air Tanah dalam Daerah Provisi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Wila Perumahan Air Tanah dalam Daerah Provisi	19 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	1 Laporan	8 Dokumen	96,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN 2023	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100	9	10	11 = (10/4) x 100
1.25.01	C. PROGRAM PENGELOMANG MINERAL DAN BATUBARA	Pesantren Keterampilan Pelayanan Informasi dan Pengembangan Mineral dan Batubara	100 %	72,33 %	62,15 %	134,38 %	212,52%	80,96 %	134,38 %	134,38%
1.25.01.1.01	11 Kegiatan : Pendidikan, Pelatihan dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	Pemerintah Kabupaten Kegiatan Pelatihan dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Lain yang dianggarkan dengan 12 Mei	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
1.25.01.1.01.001	11.1 Pengaspalan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	Jumlah Dokumen Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Terserap dan Selesai dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Lain yang Terkumpul dan Terserap	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
1.25.01.1.01.002	11.2 Penelitian dan Pengolahan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	Jumlah Dokumen Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Terserap dan Selesai dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Lain yang Diambil dan Diapkan	24 Dokumen	22 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	6 Dokumen	24 Dokumen	141,67%
1.25.01.1.01.003	11.3 Pengembangan dan Penguasaan Penambangan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penambangan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Terserap dan Selesai dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	0 Laporan	2 Dokumen	50,00%
1.25.01.1.01.004	11.4 Pengembangan dan Penguasaan Penambangan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penambangan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Terserap dan Selesai dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	0 Laporan	2 Dokumen	50,00%
1.25.01.1.03	12 Kegiatan : Penataan dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penataan Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Usaha Perambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	Pemerintah Kabupaten Kegiatan Penataan dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penataan Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Usaha Perambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
1.25.01.1.03.000	12.1 Koordinasi dan Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Perambangan dalam Pemilihan Wilayah Perambangan dan Penentuan Pula	Jumlah Laporan Hasil koordinasi dan Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Perambangan dalam Pemilihan Wilayah Perambangan dan Penentuan Pula	28 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100,00%	8 Laporan	22 Dokumen	78,57%
1.25.01.1.03.001	12.2 Penyusunan Rekomendasi Perencanaan dan Informasi dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penataan Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Usaha Perambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan dan Informasi dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penataan Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Usaha Perambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	20 Dokumen	40 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	6 Dokumen	61 Dokumen	244,00%
1.25.01.1.03.004	12.3 Pengembangan dan Penguasaan Pelaksanaan Perencanaan dan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penataan Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Usaha Perambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Perencanaan Usaha Perambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penataan Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Usaha Perambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Lain sampai dengan 12 Mei	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Dokumen	75,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2025	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100	9	10	11 = (10/4) x 100
2.25.02.1.04	12. Kegiatan : Pemasukan (di: Pemukiman Rakyat dan Komoditas Mineral) (di:an, Sabana, Mineral Bukit Logam, dan Saban dan Wilayah Perkebangan Rakyat	Pemenuhan Ketersediaan Kapasitas Perencanaan dan Perambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Sabana, Mineral Bukit Logam, dan Saban dan Wilayah Perkebangan Rakyat	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
2.25.02.1.04.0002	13.1. Koordinasi dan Sinergitas dalam rangka Penyusunan Usulan APN dan Penetapan Wilayah Perkebangan dan Perikanan Padi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinergitas dalam Rangka Penyusunan Usulan APN dan Penetapan Wilayah Perkebangan dan Perikanan Padi	3 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	3 Laporan	2 Dokumen	67,00%
2.25.02.1.04.0003	13.2. Penyusunan dan Penetapan Rekomendasi Perencanaan dan Informasi dan Perkebangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Sabana, Mineral Bukit Logam, dan Saban dan Wilayah Perkebangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan dan Informasi dan Perkebangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Sabana, Mineral Bukit Logam, dan Saban dan Wilayah Perkebangan Rakyat	6 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
2.25.02.1.04.0005	13.3. Pelaksanaan Relokasi dan Pencantangan Sensus Pemegang Tanah Perkebangan Rakyat (PP)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pencantangan Sensus Pemegang Tanah Perkebangan Rakyat (PP)	13 Laporan	4 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100,00%	3 Laporan	18 Dokumen	69,23%
2.25.02	D. PROGRAM : PENCILOAN ENERGI TERBARUKAN	Capaian ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemenuhan lapangan energi baru terbarukan	100 %	17,65 %	42,36 %	65,71 %	141,65%	75,94 %	75,94 %	75,94%
2.25.02.1.01	14. Kegiatan : Perencanaan dan Perambangan Lapangan Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI (di:an dan Darat) Panas ke Arah Laut Lepas dan ke Arah Perairan Kepulauan	Pemenuhan Ketersediaan Kapasitas Perencanaan dan Perambangan Lapangan Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI (di:an dan Darat) Panas ke Arah Laut Lepas dan ke Arah Perairan Kepulauan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
2.25.02.1.01.0001	14.1. Penyusunan Prosedur dan Penyusunan dan Perambangan Lapangan Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI (di:an dan Darat) Panas ke Arah Laut Lepas dan ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen Prosedur dan Penyusunan dan Perambangan Lapangan Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI (di:an dan Darat) Panas ke Arah Laut Lepas dan ke Arah Perairan Kepulauan yang Disiapkan	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	75,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
2.25.02.1.01.0002	14.2. Penyusunan Rekomendasi Perencanaan dan Informasi dan Perambangan Lapangan Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI (di:an dan Darat) Panas ke Arah Laut Lepas dan ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan dan Informasi dan Perambangan Lapangan Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI (di:an dan Darat) Panas ke Arah Laut Lepas dan ke Arah Perairan Kepulauan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
2.25.02.1.01.0003	14.3. Pengendalian dan Pelaksanaan Pelaksanaan Perencanaan Perambangan Lapangan Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI (di:an dan Darat) Panas ke Arah Laut Lepas dan ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pelaksanaan Pelaksanaan Perencanaan Perambangan Lapangan Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI (di:an dan Darat) Panas ke Arah Laut Lepas dan ke Arah Perairan Kepulauan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300%	3 Laporan	1 Dokumen	100,00%
2.25.02.1.02	15. Kegiatan : Pengalihan Penyelidikan Sensus dan/atau Bagan dan Wilayah Perikanan	Pemenuhan Ketersediaan Kapasitas Pengalihan penyelidikan Sensus dan/atau Bagan dan Wilayah Perikanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
2.25.02.1.02.0001	15.1. Penyusunan dan Penetapan Data Potensi Sensus	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan Data Potensi Sensus	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	50,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN 2023	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100	9	10	11 = (10/4) x 100
3.25.06.1.01	10. Kegiatan Pengelolaan aneak energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, air dan geotermal, air geotermal dan peledakan suhu tinggi (su) dalam wilayah provinsi	Pemenuhan Ketersediaan Kapasitas Pengelolaan aneak energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, air dan geotermal, air geotermal dan peledakan suhu tinggi (su) dalam wilayah provinsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.25.06.1.01.0002	10.1 Pembiayaan dan pengusahaan aneak EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah Laporan Pembiayaan dan pengusahaan aneak EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	3 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	0 Laporan	1 Dokumen	20,00%
3.25.06.1.01.0003	10.2 Pemenuhan kapasitas pembangkit aneak EBT	Jumlah Unit terpasang kapasitas pembangkit aneak EBT	7 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	11 Unit	12 Dokumen	171,43%
3.25.06.1.01.0010	10.3 Penyuluhan dan pembekalan data potensi aneak EBT di daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyuluhan dan pembekalan data potensi aneak EBT di daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	0 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
3.25.06	E. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN									
		Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Meneruhi Standar	81,17 %	83,67 %	83,42 %	100,00 %	120,26%	100,00 %	100,00 %	100,00%
		Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Dientaskan, Daerah Terpencil dan Pedesaan	66.886 RTD	11.328 RTD	17.688 RTD	11.907 RTD	78,94%	17.688 RTD	40.246 RTD	59,39%
3.25.06.1.01	17. Kegiatan Pelaksanaan dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non-Batubara (Usaha MUK Negara dan Perusahaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Pemenuhan Ketersediaan Kapasitas Pelaksanaan dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non-Batubara (Usaha MUK Negara dan Perusahaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.25.06.1.01.0001	17.1 Pemetaan Prosedur dan Penyusunan dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non-Batubara (Usaha MUK Negara dan Perusahaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Penyusunan dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non-Batubara (Usaha MUK Negara dan Perusahaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditolak	24 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	18 Dokumen	75,00%
3.25.06.1.01.0002	17.2 Penyusunan Rekomendasi Perencanaan dan Informasi dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non-Batubara (Usaha MUK Negara dan Perusahaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perencanaan dan Informasi dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non-Batubara (Usaha MUK Negara dan Perusahaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	80 Dokumen	147 Dokumen	78 Dokumen	78 Dokumen	100,00%	80 Dokumen	300 Dokumen	87,50%
3.25.06.1.01.0003	17.3 Pengujian dan Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non-Batubara (Usaha MUK Negara dan Perusahaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengujian dan Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non-Batubara (Usaha MUK Negara dan Perusahaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	2 Laporan	8 Dokumen	75,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN 2025	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100	9	10	11 = (10/4) x 100
3.25.06.1.01	10. Kegiatan : Peningkatan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Peningkatan Sarana Penyediaan Tenaga Laki - Perempuan, Daerah Target dan Pendanaan	Peningkatan keterampilan kegiatan Peningkatan untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Peningkatan Sarana Penyediaan Tenaga Laki - Perempuan, Daerah Target dan Pendanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
3.25.06.1.01.0001	17.1. Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu	24 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	100,00%	0 Laporan	10 Dokumen	75,00%
3.25.06.1.01.0002	17.2. Peningkatan Sarana Penyediaan Tenaga Laki - Perempuan, Daerah Target dan Pendanaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Laki - Perempuan, Daerah Target dan Pendanaan	25.125 RTs	0 RTs	0 RTs	0 RTs	100,00%	7.000 RTs	22.700 Dokumen	81,37%

Untuk indikator kinerja Kegiatan dalam dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Indikator kinerja kegiatan yang dievaluasi capaiannya adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) indikator kinerja sub kegiatan.

Terlihat pada tabel 2.4 diatas bahwa capaian kinerja kegiatan untuk 77 indikator indikator kinerja sub kegiatan (*Output*) bervariasi tingkat capaiannya dibandingkan dengan target akhir periode RENSTRA setelah 3 dari 4 periode RENSTRA Perangkat Daerah telah dan sedang dilaksanakan, yang secara pengelompokan terbagi menjadi 5 (lima) pengelompokan capaian, yaitu :

1. Telah melebihi target akhir periode RENSTRA (>100%)
Terdapat 11 indikator kinerja kegiatan atau 14,29% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *output*-nya telah melebihi target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan;
2. Telah mencapai target akhir periode RENSTRA (100%)
Terdapat 2 indikator kinerja kegiatan atau 2,60% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *output*-nya telah sesuai dengan target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan;
3. Telah mencapai 75% atau lebih dari target akhir periode RENSTRA
Terdapat 31 indikator kinerja kegiatan atau 40,26% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *output*-nya telah mencapai 75% atau lebih dari target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan;
4. Tercapai kurang dari 75% dari target akhir periode RENSTRA
Terdapat 26 indikator kinerja kegiatan atau 33,77% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *output*-nya kurang dari 75% dari target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan;
5. Masih 0% dari target akhir periode RENSTRA
Terdapat 7 indikator kinerja kegiatan atau 9,09% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *output*-nya masih belum terealisasi dari target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan;

Perbedaan pencapaian 77 indikator kinerja kegiatan sebagaimana dijelaskan diatas adalah disebabkan beberapa hal, yaitu diantaranya :

1. Adanya distribusi target *output* yang tidak merata per tahun periode RENSTRA;
2. Adanya realisasi *output* yang melebihi target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode RENSTRA, misalkan *output* penerbitan rekomendasi teknis perijinan, pengadaan unit BMD sarana dan prasarana kantor, dan yang lainnya;
3. Adanya kebijakan prioritas penganggaran dalam proses perencanaan yang ditetapkan dalam Surat Edaran, sehingga tidak semua target *output* yang ada dalam 3 tahun periode RENSTRA tersebut terealisasi.

Sedangkan untuk indikator kinerja Program (*Outcome*) dalam dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026, program yang dievaluasi capaiannya adalah 5 (lima) Program dengan 6 (enam) indikator kinerja program didalamnya.

Terlihat pada tabel 2.4 diatas bahwa dari 5 program dan 6 indikator kinerja program, bervariasi tingkat capaiannya dibandingkan dengan target akhir periode RENSTRA setelah 2 dari 4 periode RENSTRA Perangkat Daerah dilaksanakan, yang secara pengelompokan terbagi menjadi 3 (tiga) pengelompokan capaian, yaitu :

1. Telah mencapai target akhir periode RENSTRA (100%)
Terdapat 1 indikator kinerja program atau 16,67% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *outcome*-nya telah sesuai dengan target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan. Indikator kinerja program yang mencapai realisasi ini adalah "Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi" yang merupakan indikator kinerja dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang target indikator kinerja program-nya adalah 100% untuk masing-masing tahun periode RENSTRA.

2. Telah mencapai 75% atau lebih dari target akhir periode RENSTRA
Terdapat 4 indikator kinerja program atau 66,67% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *outcome*-nya berada pada kisaran 50% atau lebih dengan target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan. Indikator kinerja program yang mencapai realisasi ini adalah :
 - a. Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar;
 - b. Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara;
 - c. Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah
 - d. Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan;
3. Baru tercapai dibawah 75% atau kurang dari target akhir periode RENSTRA
Terdapat 1 indikator kinerja program atau 16,67% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *outcome*-nya dibawah 75% atau kurang dari target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan. Indikator kinerja program yang mencapai realisasi ini adalah Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan;

Perbedaan pencapaian 6 indikator kinerja program sebagaimana dijelaskan diatas adalah disebabkan beberapa hal, yaitu diantaranya :

1. Adanya distribusi target *output* yang tidak merata per tahun periode RENSTRA dan berpengaruh terhadap target dan capaian indikator kinerja program per tahunnya. Demikian pula halnya apabila ada realisasi *output* yang melebihi atau kurang dari target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode RENSTRA. Hal ini disebabkan karena target semua indikator kinerja program adalah ditentukan oleh pencapaian target *output* dalam Definisi Operasionalnya.;
2. Adanya indikator kinerja program, yaitu "Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi" yang target indikator kinerja program-nya adalah 100% untuk masing-masing tahun periode RENSTRA.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Memperhatikan tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten tahun 2025, yaitu *"Pembangunan Kolaboratif yang Inklusif untuk Memperkokoh Masyarakat Banten yang Modern dalam rangka Mencapai Banten yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing"*, serta rumusan program/kegiatan perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang disampaikan pada Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025, maka ditetapkan tema pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten tahun 2025, yaitu : **"Memperkokoh Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Pengusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral melalui pembangunan kolaboratif yang inklusif untuk mencapai Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing"**.



Untuk mengimplementasikan tema pembangunan dalam Perubahan RKPDP Provinsi Banten Tahun 2025 tersebut, serta dengan memperhatikan kondisi dan isu-isu strategis terkini, telah ditetapkan 4 prioritas pembangunan yang termaktub dalam Perubahan RKPDP Provinsi Banten Tahun 2025, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

Perubahan RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten dengan mengusung tema pembangunan sebagaimana tersebut diatas, difokuskan pada penanganan Prioritas Pembangunan Daerah yang terdapat dalam okumen Perubahan RKPD Provinsi Banten tahun 2025, terutama untuk Prioritas Pembangunan yang strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, yaitu Prioritas Pembangunan No. 2, 3 dan 4, sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.7 tentang Prioritas Daerah Provinsi Banten Tahun 2025.

Tabel 3.1 Prioritas pembangunan Sektor ESDM dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2025

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perijinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan.
3	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perijinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek geologi dan sumber daya mineral
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan • Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan • Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah • Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah • Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja • Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah • Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis e-government • Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur • Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, kajian dan inovasi pelayanan publik • Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal

Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam RKP 2025, dimana untuk bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Daerahnya adalah sebagaimana terlihat di tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2 Interkoneksi Prioritas Daerah Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional untuk Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

NO.	PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH
1.	<p>PN-1 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</p> <p>PP : Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Terbarukan</p>	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
2.	<p>PN-5 : Membangkit dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</p> <p>PP : Energi dan Ketenagalistrikan</p>		PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
3.	<p>PN-6 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur</p> <p>PP : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</p>	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	<p>1. PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</p> <p>2. PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</p>

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS ESDM PROVINSI BANTEN

Telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran dari Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten dan Perubahan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 serta mengacu pula pada prioritas pembangunan yang ada dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten tahun 2025.

Rumusan Tujuan dan Sasaran dari Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut, yaitu :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA DESDM Tahun 2025

No.	TUJUAN (DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH)	SASARAN (DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA 2025
1.	Daerah: Memingkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi		Indeks Williamson (Satuan : Indeks)	0,619
	Perangkat Daerah: Memingkatkan pelayanan ke listrik dan energi terbarukan daerah yang berkualitas dan berkeadilan serta berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Memingkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Satuan : Level)	tinggi
		Memingkatkan pelayanan ke listrik dan energi terbarukan yang optimal	1. Persentase pemenuhan anggaran energi baru terbarukan (Satuan : %) 2. Rasio Elektrifikasi (Satuan : %)	40 98,82
2.	Daerah: Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Satuan : %)	15
	Perangkat Daerah: Optimalisasi pelayanan ketersediaan informasi dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Memingkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Satuan : Indeks)	63,09
		Memingkatkan pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral (Satuan : %)	82,94
3.	Daerah: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi (Satuan : Indeks)	74
	Perangkat Daerah: Memingkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Memingkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi	Capaian SAKIP Daerah (Satuan : Nilai)	16,56
		Memingkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Satuan : Nilai)	70-80

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten tahun 2025, telah dirancang program-program prioritas pembangunan yang dirumpunkan dan diselaraskan kedalam 4 Prioritas Pembangunan serta urusan dan kewenangan yang dimiliki Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, Perubahan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 akan berfokus pada penanganan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, yaitu Prioritas Pembangunan No. 2, 3 dan 4.

Implementasi penanganan prioritas pembangunan sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah terkait, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1.317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tabel 3.4 diuraikan program pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 beserta target sasarannya, yaitu :

Tabel 3.4 Program Prioritas dalam Perubahan pada Perubahan RKPDP Provinsi Banten Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RKPDP	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator	Target 2025
1.	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (Satuan : %)	40,00	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)	75,00
			Rasio Elektrifikasi (Satuan : %)	98,82	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (RTS)	17.000
						Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (%)	90,08
3	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam	Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral (Satuan : %)	82,94	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Prosentase pelayanan dan pengendalian geologi dan air tanah (%)	83,20
					Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Prosentase pelayanan dan pengendalian mineral dan batubara (%)	80,98
4.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Satuan : Nilai)	70-80	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%

Program pembangunan prioritas tahun 2025 beserta sasaran-sasaran yang diembannya sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.4, dilaksanakan secara operasional melalui kegiatan-kegiatan pembangunan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Perencanaan indikasi kegiatan dimaksud didasarkan atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Dalam tahapan penyusunan Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025 diatur lebih lanjut pagu komposisi program, kegiatan dan sub kegiatan beserta penganggarannya oleh **Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 25 Tahun 2025 Tanggal 13 Juni 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025 di Lampiran Pagu Indikatif per Perangkat Daerah pada Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025**. Terdapat 16 kegiatan dan 51 sub kegiatan pembangunan dalam Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025 hasil verifikasi akhir Rancangan Akhir yang tersebar di 5 unit Esselon III di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Pada tabel 3.5 dirinci daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025 yang didalam terdapat 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan pembangunan. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut tidak berubah dibandingkan dengan yang terdapat dalam Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pergeseran) Perangkat Daerah Dinas ESDM Provinsi Banten TA. 2025 maupun RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025.

Tabel 3.5 Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Penyempurnaan RANHIR Perubahan RENJA Dinas ESDM Provinsi Bante Tahun 2025

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN				CATATAN	
RENJA Tahun 2025		DPA-SKPD TA. 2025			Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Tahun 2025
1		2			3
A.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	A.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	A.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.9	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.9	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.9	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN				CATATAN
RENJA Tahun 2025	DPA-SKPD TA. 2025	Rancangan Akhir Perubahan RENJA Tahun 2025		
1	2	3	4	
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tetap	
5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tetap	
5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tetap	
5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tetap	
5.5 Fasilitas Kunjungan Tamu	5.5 Fasilitas Kunjungan Tamu	5.5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tetap	
5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tetap	
5.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tetap	
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tetap	
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tetap	
7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pagu bertambah	
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tetap	
8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tetap	
8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tetap	
8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tetap	
8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tetap	
B. PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	B. PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	B. PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN		
9. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	9. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	9. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
9.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	9.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	9.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tetap	
10. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	10. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	10. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
10.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	10.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	10.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Tetap	
10.2 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	10.2 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	10.2 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Tetap	
10.3 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	10.3 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	10.3 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Tetap	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN				CATATAN		
RENJA Tahun 2025		DPA-SKPD TA. 2025			Rancangan Akhir Perubahan RENJA Tahun 2025	
1		2			3	
C	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	C	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		C	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
11.1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	11.1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	11.1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
11.1	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	11.1	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	11.1	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tetap
12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
12.1	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	12.1	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	12.1	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Tetap
12.2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12.2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12.2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tetap
12.3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12.3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12.3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tetap
13	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	13	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	13	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	
13.1	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	13.1	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	13.1	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Tetap
D	PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	D	PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	D	PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	
14	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, air, dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam	15	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, air, dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam	15	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, air, dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam	
14.1	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	15.2	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	15.2	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	Tetap

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN				CATATAN
RENJA Tahun 2024	DPA-SKPD TA. 2024	Rancangan Akhir Perubahan RENJA Tahun 2024		
1	2	3	4	
E. PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	E. PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	E. PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		
15. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	15. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	15. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		
15.1. Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	15.1. Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	15.1. Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tetap	
15.2. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	15.2. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	15.2. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tetap	
15.3. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	15.3. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	15.3. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tetap	
16. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	17. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	17. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
16.1. Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	17.1. Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	17.1. Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Tetap	
16.2. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	17.2. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	17.2. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tetap	
Program : 5 Kegiatan : 16 Sub Kegiatan : 51	Program : 5 Kegiatan : 16 Sub Kegiatan : 51	Program : 5 Kegiatan : 16 Sub Kegiatan : 51		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

1. Dalam penyusunan Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025 berpedoman dan mengacu pada **Surat Edaran (SE) Plh Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 25 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025**.
2. Substansi perubahan yang dilaksanakan adalah penyesuaian pagu per program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pagu indikatif yang tercantum pada Lampiran Surat Edaran (SE) Plh Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 25 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Pagu Indikatif Perangkat Daerah pada Perubahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA. 2025 di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya di Bab II terkait Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025;
3. Berdasarkan Surat Edaran tersebut di point 1 dan 2, telah disusun Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025 yang didalamnya terdiri dari 5 program dan 16 kegiatan pembangunan.
4. Dari 16 kegiatan pembangunan tersebut di point 3, terdapat 51 sub kegiatan yang masing-masing memiliki indikator dan target kinerja sub kegiatan (*output*).
5. Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025 tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1.317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6. Rencana pendanaan untuk Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 46.840.115.700,-** yang dialokasikan untuk mendanai 5 program, 16 kegiatan, dan 51 sub kegiatan. Rencana pendanaan tersebut sesuai dengan nilai alokasi pendanaan Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025 yang tercantum pada Lampiran Surat Edaran (SE) Plh Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 25 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Pagu Indikatif Perangkat Daerah pada Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025.
7. Bila diperbandingkan dengan pagu indikatif di RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025, pagu APBD Murni dan pagu APBD Pergeseran TA. 2025 yang tercantum dalam DPA-SKPD TA. 2025 dan DPPA-SKPD TA. 2025, maka pagu indikatif Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah lebih kecil dibandingkan ketiganya, sebagaimana perbandingan berikut :
 - a. Pagu Indikatif RENJA DESDM Tahun 2025 : Rp. 49.133.595.000
 - b. Pagu DPA-SKPD DESDM Tahun 2025 : Rp. 54.076.195.000
 - c. Pagu DPPA-SKPD DESDM Tahun 2025 : Rp. 46.972.312.750
 - d. Pagu Indikatif Perubahan RENJA Tahun 2025 : Rp. 46.840.115.700
8. Dalam Perubahan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025 yang didalamnya mencakup 5 program, 16 kegiatan, dan 51 sub kegiatan, **terdapat 4 sub kegiatan yang mengalami perubahan target kinerja** dibandingkan dengan yang tercantum DPA-SKPD TA. 2025. Sedangkan penyesuaian pagu per sub kegiatan dari 51 Sub Kegiatan adalah sebagaimana berikut :
 - a. Sub Kegiatan Pagu Tetap : 11
 - b. Sub Kegiatan Pagu Bertambah : 6
 - c. Sub kegiatan Pagu Berkurang : 34

9. Dalam tabel 4.1 digambarkan Rumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas ESDM Tahun 2025 sebagaimana disebutkan diatas, yang menyajiannya menyesuaikan dengan matriks yang dimintakan Bidang Mitra BAPPEDA Provinsi Banten untuk proses kertas kerja verifikasi di tahapan Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan dari Penyempurnaan RanHir Perubahan RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHR P-RKPD 2025		Berubah/Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = 7 - 5	9.	10.
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			47.207.207.955,00		46.340.115.707,00	-307.192.250,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			47.207.207.955,00		46.340.115.707,00	-307.192.250,00		
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			47.207.207.955,00		46.340.115.707,00	-307.192.250,00		
3.29.01	PROGRAM PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	22.685.779.955,00	100 Persen	22.455.945.057,00	170.166.000,00		
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	296.914.000,00	100 Persen	286.344.000,00	-33.570.000,00		
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	68.850.000,00	3 Dokumen	62.250.000,00	-6.600.000,00	Rubah Rincian	Evaluasi belanja makanan dan minuman rapat serta jasa narasumber yang tidak digunakan
3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.475.000,00	1 Dokumen	12.475.000,00	0,00		
3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.484.000,00	1 Dokumen	12.484.000,00	0,00		
3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.483.000,00	1 Dokumen	7.483.000,00	0,00		
3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.486.000,00	1 Dokumen	7.486.000,00	0,00		
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	20.720.000,00	16 Laporan	16.220.000,00	-4.500.000,00	Rubah Rincian	Evaluasi belanja makanan dan minuman rapat serta jasa narasumber yang tidak digunakan
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	121.946.000,00	13 Laporan	115.496.000,00	-5.550.000,00	Rubah Rincian	Evaluasi belanja makanan dan minuman rapat serta jasa narasumber yang tidak digunakan
3.29.01.1.01.0008	Peaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Dipertika Lintup Perangkat Daerah	1 Data	27.570.000,00	1 Data	12.910.000,00	-14.700.000,00	Rubah Rincian	Evaluasi belanja makanan dan minuman rapat serta jasa narasumber yang tidak digunakan
3.29.01.1.01.0009	Peaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	21.860.000,00	1 Berita Acara	19.640.000,00	-2.220.000,00	Rubah Rincian	Evaluasi belanja cetak, makanan dan minuman rapat serta jasa narasumber yang tidak digunakan
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	19.710.017.865,00	100 Persen	20.410.017.807,00	700.000.000,00		
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ Bulan	19.227.000.000,00	76 Orang/ Bulan	19.927.000.000,00	700.000.000,00	Rubah Rincian	Penambahan Gaji dan Tunjangan ASN sesuai Pagu SC
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	424.705.000,00	12 Dokumen	424.705.000,00	0,00		
3.29.01.1.02.0003	Peaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.148.000,00	12 Dokumen	15.148.000,00	0,00		
3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.948.800,00	12 Dokumen	1.948.800,00	0,00		
3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.832.000,00	1 Laporan	8.832.000,00	0,00		
3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Findak Lampu Pemeriksaan	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Bertambah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL / Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	24.200.000,00	16 Laporan	24.200.000,00	0,00		
3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.104.000,00	2 Dokumen	4.104.000,00	0,00		
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	200.000,00	100 Persen	200.000,00	0,00		
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	200.000,00	0,00		
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	59.640.000,00	100 Persen	59.640.000,00	0,00		
3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.200.000,00	1 Dokumen	2.200.000,00	0,00		
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	47.640.000,00	6 Orang	47.640.000,00	0,00		
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	289.993.000,00	100 Persen	308.074.000,00	18.081.000,00		
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	1 Paket	30.027.000,00	5.027.000,00	Rubah Rincian	Penambahan Rincian Belanja Pembelian kabel listrik NYM 3x2,5mm 1 roll
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	2 Paket	110.625.000,00	10.625.000,00	Rubah Rincian	Penambahan Rincian Belanja Pembelian 2 buah kabel HDMI, 10 set keyboard wireless combo, dan 3000 printer 30A
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	32.429.000,00	2.429.000,00	Rubah Rincian	Penambahan Rincian Belanja Pembelian 7 unit dusak, 22 buah kamper, 1 buah leg per lantai
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	79.993.000,00	1 Laporan	79.993.000,00	0,00		
3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	600.000,00	100 Persen	6.071.000,00	6.271.000,00		
3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	600.000,00	1 Unit	6.071.000,00	6.271.000,00	Rubah Rincian	Penambahan Rincian Belanja Pengadaan 1 Unit AC 1,5 PK untuk Mushala

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Bertambah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8+7-5	9	10
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.626.224.450,00	100 Persen	1.345.004.450,00	10.700.000,00		
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00	12 Laporan	250.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.576.224.450,00	12 Laporan	1.395.004.450,00	18.700.000,00	Rubah Rincian	Perubahan koefisien rincian belanja ATK dan Pengalihan belanja jasa pengangkutan sampah
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	490.983.000,00	100 Persen	557.587.000,00	58.604.000,00		
3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	160.203.000,00	7 Unit	160.203.000,00	0,00		
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	300.000.000,00	27 Unit	257.114.000,00	57.154.000,00	Rubah Rincian	Perubahan Pemeliharaan 8 unit kendaraan Listrik Roda Dua dan 2 unit kendaraan Roda Empat
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	30.000.000,00	39 Unit	50.230.000,00	20.230.000,00	Rubah Rincian	Perubahan Pemeliharaan 1 unit Genset 250KV dan 8 unit komputer
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	1 Unit	75.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	33.780.000,00	1 Unit	15.000.000,00	-18.780.000,00	Rubah Rincian	Pengurangan belanja jasa pengangkutan sampah dan dialihkan ke Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00		
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGAN	Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah	83,20 Persen	949.436.000,00	83,20 Persen	949.436.000,00	0,00		
3.29.02.1.01	Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	0,00		
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen	644.340.000,00	4 Dokumen	644.340.000,00	0,00		
3.29.02.1.02	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 Persen	105.096.000,00	100 Persen	105.096.000,00	0,00		
3.29.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	21 Dokumen	26.292.000,00	21 Dokumen	26.292.000,00	0,00		
3.29.02.1.02.0002	Penghitungan, Penunjukan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Penunjukan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	21 Dokumen	22.518.000,00	21 Dokumen	22.518.000,00	0,00		
3.29.02.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	56.288.000,00	1 Laporan	56.288.000,00	0,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P.RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P.RKPD 2025		Bertambah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah XKL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara	80,98 Persen	543.858.000,00	80,98 Persen	543.858.000,00	0,00		
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Persen	25.500.000,00	100 Persen	25.500.000,00	0,00		
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	8 Dokumen	25.500.000,00	8 Dokumen	25.500.000,00	0,00		
3.29.03.1.03	Penetuisahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetuisahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	100 Persen	417.758.000	100 Persen	417.758.000	0		
3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	3 Laporan	335.838.000	3 Laporan	335.838.000	0,00		
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan informasi izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8 Dokumen	17.840.000	8 Dokumen	17.840.000	0,00		
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	64.000.000	1 Laporan	64.000.000	0,00		
3.29.03.1.04	Penetuisahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetuisahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00	0,00		
3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	100.000.000,00	0,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Berambah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	75,00 Persen	6.066.413.800,00	75,00 Persen	6.066.413.800,00	0,00		
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan turbin air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan turbin air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	100 %	6.066.413.800,00	100 %	6.066.413.800,00	0,00		
3.29.05.1.07.0007	Peleaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	11 unit	6.066.413.800,00	11 unit	6.066.413.800,00	0,00		
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar	90,00 Persen	16.961.621.100,00	90,00 Persen	15.624.462.850,00	-1.137.358.250,00		
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100 Persen	229.690.000,00	100 Persen	203.468.000,00	-26.222.000,00		
3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3 Dokumen	54.900.000,00	3 Dokumen	54.900.000,00	0,00		
3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	80 Dokumen	27.050.000,00	80 Dokumen	27.050.000,00	0,00		
3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik	2 Laporan	147.740.000,00	2 Laporan	121.518.000,00	-26.222.000,00	Rubah Rincian	Pengurangan jasa Konsultan Individu yang tidak digunakan
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	100 Persen	16.732.131.100,00	100 Persen	15.629.994.850,00	-1.111.136.250,00		
3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	6 Laporan	1.469.650.100,00	6 Laporan	1.469.650.100,00	0,00		
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	7.000 Unit	15.262.481.000,00	7.000 Unit	14.151.344.750,00	-1.111.136.250,00	Rubah Rincian	Pengurangan Sesuai Pagu BE Paket Pekerjaan Bamos Pemasangan R dan SR, Belanja Material dan Jasa Tenaga Ahli
J U M L A H					47.207.307.955,00		46.840.115.707,00	-367.192.250,00	

BAB V
PENUTUP



BAB V

PENUTUP

- A. Dokumen ini merupakan hasil dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan tahapan penyusunan Penyempurnaan Rancangan Akhir.
- B. Selanjutnya untuk penetapan pagu indikatif perangkat daerah, dokumen ini juga dilandasi oleh Surat Edaran (SE) Plh Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 25 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lampiran Pagu Indikatif per Perangkat Daerah pada Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025.
- C. Berdasarkan uraian di point A dan B diatas, telah disusun Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 yang didalamnya terdiri dari 5 program, 16 kegiatan dan 51 sub kegiatan yang masing-masing memiliki indikator dan target kinerja yang harus dicapai. Rencana pendanaan yang dialokasikan untuk Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025 tersebut adalah sebesar **Rp. 46.840.115.700,-**.
- D. Bila diperbandingkan dengan pagu indikatif di RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025, pagu APBD Murni dan pagu APBD Pergeseran TA. 2025 yang tercantum dalam DPA-SKPD TA. 2025 dan DPPA-SKPD TA. 2025, maka pagu indikatif Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah lebih kecil dibandingkan ketiganya, sebagaimana perbandingan berikut :
1. Pagu Indikatif RENJA DESDM Tahun 2025 : Rp. 49.133.595.000
 2. Pagu DPA-SKPD DESDM Tahun 2025 : Rp. 54.076.195.000
 3. Pagu DPPA-SKPD DESDM Tahun 2025 : Rp. 46.972.312.750
 4. Pagu Indikatif Perubahan RENJA Tahun 2025 : Rp. 46.840.115.700

E. Dalam Perubahan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025 yang didalamnya mencakup 5 program, 16 kegiatan, dan 51 sub kegiatan, **terdapat 4 sub kegiatan yang mengalami perubahan target kinerja** dibandingkan dengan yang tercantum DPA-SKPD TA. 2025. Sedangkan penyesuaian pagu per sub kegiatan dari 51 Sub Kegiatan adalah sebagaimana berikut :

- a. Sub Kegiatan Pagu Tetap : 11
- b. Sub Kegiatan Pagu Bertambah : 6
- c. Sub kegiatan Pagu Berkurang : 34

F. Untuk melaksanakan Perubahan RENJA Perangkat Daerah ini agar diperhatikan 4 (empat) prinsip utama, yaitu :

1. Prinsip Perencanaan Kegiatan, mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif memiliki kekhususan (*specific*), terukur (*measurable*), ketercapaian (*achievable*), ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan waktu (*time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk pada rencana capaian kinerja berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan, merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas SKPD, antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat.
2. Prinsip Administrasi Perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan Rencanakan (*plan*), kerjakan apa yang direncanakan (*do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*check*), dan aksi tindak lanjut.
3. Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :
 - a. Taat dan sesuai aturan
 - b. Sesuai dengan norma profesionalisme
 - c. Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*quality result driven*)
4. Prinsip Dukungan Kebijakan Keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*money follow program selected policy*)

**LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
BANTEN TENTANG PENETAPAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2025**





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani Curug-Palima Telp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang

Website: desdm.bantenprov.go.id Email : desdm@bantenprov.go.id Kode Pos : 42171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

Nomor : 902/Kep. 465 – DESDM/2025

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025, dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk terbentuknya tim sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5585);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

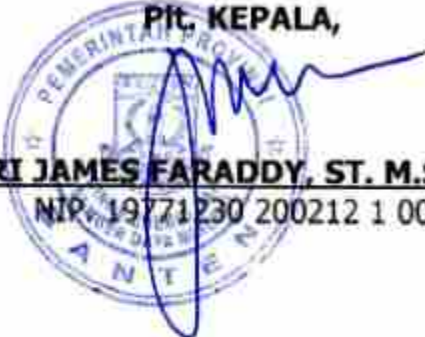
1. Menyusun perumusan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025;
2. Menyusun perumusan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025;
3. Menyusun Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025;
4. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Perubahan sesuai dengan sistematika penulisan, tahapan, dan tata cara termasuk melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;

KETIGA : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten bertanggungjawab secara administrasi maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 02 Mei 2025

PIL. KEPALA,

ARI JAMES FARADDY, ST. M.Si. MT
NIP. 19771230 200212 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Wakil Gubernur Banten
3. Yth. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

Nomor : 902/Kep. 465 - DESDM/2025

Tanggal : 02 Juni 2025

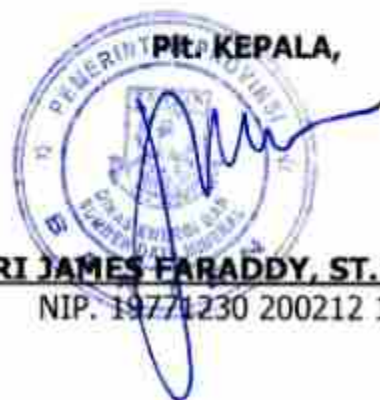
Tentang : Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Ari James Faraddy, ST. M.Si. MT NIP. 19771230 200212 1 008	Plt. Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	AHMAD HERI SUDRAJAT, ST, M.Si NIP. 19750220 200604 1 005	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	Ketua
3.	Yiyi Bochari, S.Sos, M.Si NIP. 19710924 200112 1 003	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Deri Dariawan, S.T, M.MT NIP. 19780311 200112 1 002	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Anggota
5.	Dedi Hidayat, ST, MA NIP. 19760422 200112 1 001	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Anggota
6.	Ii Mahfudin, ST. NIP. 19811025 201001 1 002	Plt. Kabid Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Anggota
7.	Hilman Saptajji, ST, M.MT NIP. 19720926 200604 1 004	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Nia Juniawati, S.Si., MM NIP. 19760602 200604 2 016	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat
9.	Juheriyah, S.Sos NIP. 19820110 200212 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat
10.	Andri Zainal Arifin NIP. 19760609 201410 1 001	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 02 Mei 2025


PIT. KEPALA,

ARI JAMES FARADDY, ST. M.Si. MT
NIP. 19771230 200212 1 008

**LAMPIRAN II : SURAT EDARAN PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN TENTANG PENYUSUNAN
PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Daerah Provinsi Banten;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Banten;
3. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

SURAT EDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Memperhatikan tahapan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.6/3100/Bangda tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025.

Berkenan dengan hal tersebut di atas, agar Kepala Perangkat Daerah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Penyesuaian Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan Pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini;
2. Menyesuaikan indikator program dengan target, sesuai dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah serta menyinkronkan prioritas daerah yang mendukung prioritas nasional;
3. Melaksanakan penyusunan dan verifikasi Renja Perangkat Daerah dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Input Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan rincian belanja pada SIPD pada Jumat 13 s.d 16 Juni 2025;
 - b. Verifikasi Perubahan Renja dan Perbaikan Hasil Verifikasi Perubahan Renja Perangkat Daerah pada 16 Juni 2025;

4. Menyelesaikan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 hasil penyempurnaan, disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, paling lambat pada 16 Juni 2025 pukul 11.59 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 13 Juni 2025

Plh. Sekretaris Daerah

Deden Apriandhi

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan).

Berdasarkan Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten

Nomor : 25 Tahun 2025

Tanggal : 13 Juni 2025

**PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
PADA PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	URAIAN	PAGU	KETERANGAN
1.	PAGU APBD 2025	54.076.195.000	
2.	PAGU RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025	47.207.307.950	
3.	PAGU PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025	46.840.115.700	
	Belanja Pegawai	700.000.000	Penyesuaian Belanja Pegawai
	Belanja Barang dan Jasa	-	
	Belanja Hibah	-	
	Belanja Bantuan Sosial	(1.067.192.250)	Efisiensi Lisdas
	Belanja Modal Tanah	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	
	Belanja Tidak Terduga	-	
	Belanja Bagi Hasil	-	
	Belanja Bantuan Keuangan	-	
5.	BERTAMBAH/ BERKURANG	(367.192.250)	Selisih Rankhir dan Penyempurnaan
6.	BERTAMBAH/ BERKURANG	(7.236.079.300)	Selisih APBD dan P-RKPD

**LAMPIRAN III : RUMUSAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2026 DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
(KERTAS KERJA VERIFIKASI DAN HASIL
CETAK APLIKASI SIPD-RI)**



MATRIKS PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2025

OPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Berubah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KRL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			47.207.367.988,00		46.940.116.796,00	-267.182.292,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			47.207.367.988,00		46.940.116.796,00	-267.182.292,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			47.207.367.988,00		46.940.116.796,00	-267.182.292,00		
1.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	22.486.778.050,00	100 Persen	22.456.946.092,00	770.166.900,00		
1.29.01.1.01	Pembiayaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembiayaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	299.314.000,00	100 Persen	299.344.000,00	-23.570.000,00		
1.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	3 Dokumen	68.500.000,00	3 Dokumen	62.266.000,00	6.234.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi biaya, masukan dan masukan rapat kerja jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen R-U, SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.475.000,00	1 Dokumen	12.475.000,00	0,00		
1.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.466.000,00	1 Dokumen	12.466.000,00	0,00		
1.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD	1 Dokumen	7.482.000,00	1 Dokumen	7.482.000,00	0,00		
1.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SKPD	1 Dokumen	7.486.000,00	1 Dokumen	7.486.000,00	0,00		
1.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	20.720.000,00	16 Laporan	19.229.000,00	1.491.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi biaya, masukan dan masukan rapat kerja jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	121.046.000,00	13 Laporan	115.496.000,00	5.550.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi biaya, masukan dan masukan rapat kerja jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sekoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sekoral Daerah yang Telah Diumpulkan dan Dipertahankan Laporan Perangkat Daerah	1 Data	27.330.000,00	1 Data	12.810.000,00	14.520.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi biaya, masukan dan masukan rapat kerja jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	21.000.000,00	1 Berita Acara	19.640.000,00	1.360.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi biaya, masukan dan masukan rapat kerja jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	19.210.917.800,00	100 Persen	20.410.917.800,00	-700.000.000,00		
1.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/Bulan	18.227.200.000,00	76 Orang/ Bulan	18.927.200.000,00	700.000.000,00	Rubah Rincian	Penambahan Gaji dan Tunjangan ASN sesuai Pagu DC
1.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	424.705.000,00	12 Dokumen	424.705.000,00	0,00		
1.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Pembudayaan dan Pengujian/Validasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pembudayaan dan Pengujian/Validasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.148.000,00	12 Dokumen	15.148.000,00	0,00		
1.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.948.900,00	12 Dokumen	1.948.900,00	0,00		
1.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.802.000,00	1 Laporan	6.802.000,00	0,00		
1.29.01.1.02.0006	Pengujian dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Rencana Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.080.000,00	1 Dokumen	4.080.000,00	0,00		

(Handwritten signature/initials)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Berambah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah/ Tawaran/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	24.200.000,00	18 Laporan	24.200.000,00	0,00		
3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.704.000,00	2 Dokumen	4.704.000,00	0,00		
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	200.000,00	100 Persen	200.000,00	0,00		
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	200.000,00	0,00		
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	56.946.000,00	100 Persen	56.946.000,00	0,00		
3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakar Unas Besar/ Akibat Keunggulannya	Jumlah Paket Pakar Unas Besar/ Akibat Keunggulannya	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	0,00		
3.25.01.1.05.0003	Workshop, Evaluasi, dan Pelatihan Karyawan Pegawai	Jumlah Dokumen Workshop, Evaluasi, dan Pelatihan Karyawan Pegawai	1 Dokumen	2.220.000,00	1 Dokumen	2.220.000,00	0,00		
3.25.01.1.05.0008	Pemilihan dan Penempatan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Alang/ Kefitiran dan Pelatihan	6 Orang	47.646.000,00	6 Orang	47.646.000,00	0,00		
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	289.980.000,00	100 Persen	289.974.000,00	-6.000,00		
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	1 Paket	30.027.000,00	-5.000.000,00	Rubah Rincian	Perubahan Rincian Belanja Pembelian kabel listrik NYST 2x2, 5mm 1 roll
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Perakitan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	160.000.000,00	2 Paket	114.625.000,00	-45.375.000,00	Rubah Rincian	Perubahan Rincian Belanja Pembelian 2 buah kabel HDMI, 10 set keyboard wireless combo, dan mouse pointer 36k
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	32.429.000,00	2.429.000,00	Rubah Rincian	Perubahan Rincian Belanja Pembelian 1 unit cluster, 22 buah vasatex, 1 buah kipas angin
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	0,00		
3.25.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	0,00		
3.25.01.1.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	79.993.000,00	1 Laporan	79.993.000,00	0,00		
3.25.01.1.06.0011	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00		
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	600.000,00	100 Persen	6.271.000,00	5.671.000,00		
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Perakitan dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Perakitan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	6 Unit	600.000,00	1 Unit	6.271.000,00	5.671.000,00	Rubah Rincian	Perubahan Rincian Belanja Pengadaan 1 Unit AC 1.5 Pk, unit Meubel
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.626.224.430,00	100 Persen	1.643.054.430,00	16.830.000,00		
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00	12 Laporan	250.000.000,00	0,00		
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.676.224.430,00	12 Laporan	1.693.054.430,00	16.830.000,00	Rubah Rincian	Perbaikan kualitas mesin belanja ATK dan Pengadaan belanja jasa pengangkutan sampah


KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Berubah/Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.01.1.01	Pemeliharaan Bangun MBR Daerah Perumahan Urusan Pemertahanan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Bangun MBR Daerah Perumahan Urusan Pemertahanan Daerah	100 Persen	490.803.000,00	100 Persen	497.387.000,00	6.584.000,00		
3.29.01.1.09.0001	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Servis Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan Dibayar Pajaknya	7 Unit	180.200.000,00	7 Unit	180.200.000,00	0,00		
3.29.01.1.09.0002	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Servis Pemeliharaan, Pajak dan Biaya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	27 Unit	290.300.000,00	27 Unit	297.184.000,00	6.884.000,00	Rubah Rincian	Pemeliharaan Pemeliharaan 1 unit kendaraan Listrik, Roda Dua dan 2 unit kendaraan Roda Empat
3.29.01.1.09.0005	Pemeliharaan, Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa	38 Unit	30.500.000,00	39 Unit	30.230.000,00	-270.000,00	Rubah Rincian	Pemeliharaan Pemeliharaan 1 unit Diesel 200KV dan 6 unit komputer
3.29.01.1.09.0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Dinhabiskan	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Dinhabiskan	1 Unit	33.780.000,00	1 Unit	15.000.000,00	-18.780.000,00	Rubah Rincian	Pengurangan belanja jasa pengangkutan sampah dan ditanamkan ke Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Dinhabiskan	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00		
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Informasi dan Pengendalian Zonasi Geologi Dan Air Tanah	83,36 Persen	948.436.000,00	83,36 Persen	949.436.000,00	0,00		
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	0,00		
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen	844.340.000,00	4 Dokumen	844.340.000,00	0,00		
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 Persen	105.096.000,00	100 Persen	105.096.000,00	0,00		
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	21 Dokumen	26.282.900,00	21 Dokumen	26.282.000,00	-900,00		
3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	21 Dokumen	22.518.000,00	21 Dokumen	22.518.000,00	0,00		
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemakaian Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	56.298.000,00	1 Laporan	56.298.000,00	0,00		
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara	80,98 Persen	643.888.000,00	80,98 Persen	643.888.000,00	0,00		
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Persen	25.500.000,00	100 Persen	25.500.000,00	0,00		
3.29.03.1.01.0002	Pembuatan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Dibuat dan Ditayangkan	6 Dokumen	25.500.000,00	6 Dokumen	25.500.000,00	0,00		


4

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR F-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR F-RKPD 2025		Berubah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	100 Persen	417.758.000	100 Persen	417.758.000	0		
3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinergisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinergisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	8 Laporan	115.838.000	8 Laporan	115.838.000	0,00		
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8 Dokumen	17.840.000	8 Dokumen	17.840.000	0,00		
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	84.080.000	1 Laporan	84.080.000	0,00		
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00	0,00		
3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	100.000.000,00	0,00		
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Capaian ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemenuhan langsung energi baru terbarukan	75,00 Persen	5.066.413.800,00	75,00 Persen	5.066.413.800,00	0,00		
3.29.06.1.01	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa energi matahari, angin, air, dan tenaga air, panas dan geotermal suhu rendah laut dalam wilayah provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa energi matahari, angin, air, dan tenaga air, panas dan geotermal suhu rendah laut dalam wilayah provinsi	100 %	5.066.413.800,00	100 %	5.066.413.800,00	0,00		
3.29.06.1.01.0007	Pelaksanaan kegiatan pemertanian aneka EB?	Jumlah hasil kegiatan pemertanian aneka EB?	11 unit	5.066.413.800,00	11 unit	5.066.413.800,00	0,00		

f p f

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN APHR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAJ RANCANGAN APHR P-RKPD 2025		Mertambah/Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah WSL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.04	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar	90,08 Persen	16.961.821.100,00	90,08 Persen	16.824.462.800,00	-1.137.358.250,00		
3.29.04.1.01	Pencahayaan dan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perjualan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Keberhasilan Kegiatan Pencahayaan dan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perjualan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100 Persen	229.630.000,00	100 Persen	203.468.000,00	-26.162.000,00		
3.29.04.1.01.0001	Penerapan Prosedur dan Penyediaan dan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perjualan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Penyediaan dan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perjualan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3 Dokumen	54.900.000,00	3 Dokumen	54.900.000,00	0,00		
3.29.04.1.01.0002	Perkembangan Rekomendasi Perizinan dan Wawancara dan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perjualan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi dan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perjualan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	80 Dokumen	27.000.000,00	80 Dokumen	27.000.000,00	0,00		
3.29.04.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perjualan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perjualan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	2 Laporan	147.240.000,00	2 Laporan	121.518.000,00	-25.722.000,00	Rubah Rincian	Pengurangan jasa konsultan individu yang tidak digunakan
3.29.04.1.02	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berhambang Daerah Terpadol dan Perdesaan	Persentase Keberhasilan Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berhambang Daerah Terpadol dan Perdesaan	100 Persen	16.732.131.000,00	100 Persen	15.620.904.850,00	-1.111.226.150,00		
3.29.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	8 Laporan	1.489.800.000,00	8 Laporan	1.489.800.000,00	0,00		
3.29.04.1.02.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berhambang Daerah Terpadol dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berhambang Daerah Terpadol dan Perdesaan	7.000 Unit	15.242.331.000,00	7.000 Unit	14.131.044.700,00	-1.111.286.300,00	Rubah Rincian	Pengurangan sesuai Pagu SE terkait Pekerjaan Banca Pemasangan IR dan DR, Biaya Material dan Jasa Tenaga Ahli yang tidak digunakan
J U M L A H					47.397.307.950,00	46.840.113.700,00	-557.194.250,00		

Paraf Verifikasi	Nama	Paraf
Kepala Bidang Mitra Bappeda	Arief Kusler Setyanan, S.T., M.T.	
Ketua Tim Kerja Mitra Bappeda	Indah Daryanti, S.T., M.M	

 **Pt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten**

Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.
NIP. 19771230 200212 1 008

MATRIKS PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2025

OPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Berubah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KRL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			47.207.367.988,00		46.940.116.796,00	-267.182.292,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			47.207.367.988,00		46.940.116.796,00	-267.182.292,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			47.207.367.988,00		46.940.116.796,00	-267.182.292,00		
1.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	22.486.778.050,00	100 Persen	22.456.946.092,00	770.166.900,00		
1.29.01.1.01	Pembiayaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembiayaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	299.314.000,00	100 Persen	299.344.000,00	-23.570.000,00		
1.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	3 Dokumen	68.500.000,00	3 Dokumen	62.266.000,00	6.234.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi biaya, masukan dan masukan rapat kerja jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen R-U, SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.475.000,00	1 Dokumen	12.475.000,00	0,00		
1.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.466.000,00	1 Dokumen	12.466.000,00	0,00		
1.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD	1 Dokumen	7.482.000,00	1 Dokumen	7.482.000,00	0,00		
1.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SKPD	1 Dokumen	7.486.000,00	1 Dokumen	7.486.000,00	0,00		
1.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	20.720.000,00	16 Laporan	19.229.000,00	1.491.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi biaya, masukan dan masukan rapat kerja jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	121.046.000,00	13 Laporan	115.496.000,00	5.550.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi biaya, masukan dan masukan rapat kerja jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sekoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sekoral Daerah yang Telah Diumpulkan dan Dipertahankan Hingga Perangkat Daerah	1 Data	27.330.000,00	1 Data	12.810.000,00	14.520.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi biaya, masukan dan masukan rapat kerja jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	21.000.000,00	1 Berita Acara	19.640.000,00	1.360.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi biaya, masukan dan masukan rapat kerja jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	19.210.917.800,00	100 Persen	20.410.917.800,00	-700.000.000,00		
1.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/Bulan	18.227.200.000,00	76 Orang/Bulan	18.927.200.000,00	700.000.000,00	Rubah Rincian	Penambahan Gaji dan Tunjangan ASN sesuai Pagu DC
1.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	424.705.000,00	12 Dokumen	424.705.000,00	0,00		
1.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Pembusahan dan Pengujian/Validasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pembusahan dan Pengujian/Validasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.148.000,00	12 Dokumen	15.148.000,00	0,00		
1.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.948.900,00	12 Dokumen	1.948.900,00	0,00		
1.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.802.000,00	1 Laporan	6.802.000,00	0,00		
1.29.01.1.02.0006	Pengujian dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Rencana Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.080.000,00	1 Dokumen	4.080.000,00	0,00		

(Handwritten signature/initials)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Berambah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah/ Tawaran/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	24.200.000,00	18 Laporan	24.200.000,00	0,00		
3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.704.000,00	2 Dokumen	4.704.000,00	0,00		
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	200.000,00	100 Persen	200.000,00	0,00		
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	200.000,00	0,00		
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	56.946.000,00	100 Persen	56.946.000,00	0,00		
3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakar Unas Besar/ Akibat Keunggulannya	Jumlah Paket Pakar Unas Besar/ Akibat Keunggulannya	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	0,00		
3.25.01.1.05.0003	Workshop, Evaluasi, dan Pelatihan Karyawan Pegawai	Jumlah Dokumen Workshop, Evaluasi, dan Pelatihan Karyawan Pegawai	1 Dokumen	2.220.000,00	1 Dokumen	2.220.000,00	0,00		
3.25.01.1.05.0008	Pembinaan dan Pemenuhan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Alang/ Kebutuhan dan Pelatihan	6 Orang	47.646.000,00	6 Orang	47.646.000,00	0,00		
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	289.980.000,00	100 Persen	289.974.000,00	-6.000,00		
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	1 Paket	30.027.000,00	-5.000,00	Rubah Rincian	Perubahan Rincian Belanja Pembelian kabel listrik NYST 2x2, 5mm 1 roll
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Perakitan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	160.000.000,00	2 Paket	114.625.000,00	-45.375.000,00	Rubah Rincian	Perubahan Rincian Belanja Pembelian 2 buah kabel HDMI, 10 set keyboard wireless combo, dan mouse pointer 36k
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	32.429.000,00	2.429.000,00	Rubah Rincian	Perubahan Rincian Belanja Pembelian 1 unit cluster, 22 buah vasatex, 1 buah kipas angin
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	0,00		
3.25.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	0,00		
3.25.01.1.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	79.993.000,00	1 Laporan	79.993.000,00	0,00		
3.25.01.1.06.0011	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00		
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	600.000,00	100 Persen	6.271.000,00	6.271.000,00		
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	6 Unit	600.000,00	1 Unit	6.271.000,00	6.271.000,00	Rubah Rincian	Perubahan Rincian Belanja Pengadaan 1 Unit AC 1.5 Pk, unit Meubel
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.626.224.430,00	100 Persen	1.643.054.430,00	16.830.000,00		
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00	12 Laporan	250.000.000,00	0,00		
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.626.224.430,00	12 Laporan	1.643.054.430,00	16.830.000,00	Rubah Rincian	Perbaikan kualitas mesin belanja ATK dan Pengadaan belanja jasa pengangkutan sampah

Handwritten signature and initials.


KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Berubah/Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.01.1.01	Pemeliharaan Bangun MBR Daerah Perumahan Urusan Pemeliharaan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Bangun MBR Daerah Perumahan Urusan Pemeliharaan Daerah	100 Persen	490.803.300,00	100 Persen	497.387.000,00	6.584.000,00		
3.29.01.1.09.0001	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan Diayatkan Pagainya	7 Unit	180.203.300,00	7 Unit	180.203.300,00	0,00		
3.29.01.1.09.0002	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan Diayatkan Pajak dan Perbaikannya	27 Unit	290.308.000,00	27 Unit	297.184.000,00	6.876.000,00	Rubah Rincian	Pemeliharaan Pemeliharaan 1 unit kendaraan Listrik, Roda Dua dan 2 unit kendaraan Roda Empat
3.29.01.1.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa	38 Unit	30.500.000,00	39 Unit	30.230.300,00	-269.700,00	Rubah Rincian	Pemeliharaan Pemeliharaan 1 unit Diesel 200KV dan 6 unit komputer
3.29.01.1.09.0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Dinhabiskan	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Dinhabiskan	1 Unit	33.780.000,00	1 Unit	15.000.000,00	-18.780.000,00	Rubah Rincian	Pengurangan belanja jasa pengangkutan sampah dan ditanamkan ke Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Dinhabiskan	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00		
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Informasi dan Pengendalian Zonasi Geologi Dan Air Tanah	83,36 Persen	948.436.000,00	83,36 Persen	949.436.000,00	0,00		
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	0,00		
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen	844.340.000,00	4 Dokumen	844.340.000,00	0,00		
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 Persen	105.096.000,00	100 Persen	105.096.000,00	0,00		
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	21 Dokumen	26.282.900,00	21 Dokumen	26.282.000,00	-800,00		
3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	21 Dokumen	22.518.000,00	21 Dokumen	22.518.000,00	0,00		
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemakaian Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	56.298.000,00	1 Laporan	56.298.000,00	0,00		
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara	80,98 Persen	643.888.000,00	80,98 Persen	643.888.000,00	0,00		
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Persen	25.500.000,00	100 Persen	25.500.000,00	0,00		
3.29.03.1.01.0002	Pembuatan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Dibuat dan Diakapkan	6 Dokumen	25.500.000,00	6 Dokumen	25.500.000,00	0,00		

4

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR F-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR F-RKPD 2025		Berubah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	100 Persen	417.758.000	100 Persen	417.758.000	0		
3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinergisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinergisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	8 Laporan	115.838.000	8 Laporan	115.838.000	0,00		
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8 Dokumen	17.840.000	8 Dokumen	17.840.000	0,00		
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	84.080.000	1 Laporan	84.080.000	0,00		
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00	0,00		
3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	100.000.000,00	0,00		
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Capaian ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemenuhan langsung energi baru terbarukan	75,00 Persen	5.066.413.800,00	75,00 Persen	5.066.413.800,00	0,00		
3.29.06.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa energi matahari, angin, air, dan tenaga air, panas dan geotermal suhu rendah laut dalam wilayah provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa energi matahari, angin, air, dan tenaga air, panas dan geotermal suhu rendah laut dalam wilayah provinsi	100 %	5.066.413.800,00	100 %	5.066.413.800,00	0,00		
3.29.06.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemertanian aneka EB?	Jumlah hasil kegiatan pemertanian aneka EB?	11 unit	5.066.413.800,00	11 unit	5.066.413.800,00	0,00		

f p f

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Berubah Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah K/L/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 + 7 - 5	9	10
3.25.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Petaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar	90,88 Persen	16.981.821.100,00	90,88 Persen	16.824.462.880,30	-1.157.358.219,70		
3.25.06.1.21	Pemeliharaan (tan Usaha) Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha MUK Negara dan Penyediaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan (tan Usaha) Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha MUK Negara dan Penyediaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100 Persen	229.598.000,00	100 Persen	229.468.000,30	-129.999,70		
3.25.06.1.21.0001	Pemeliharaan (tan Usaha) Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha MUK Negara dan Penyediaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Proedur dan Penyediaan (tan Usaha) Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha MUK Negara dan Penyediaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditapkan	3 Dokumen	54.900.000,00	3 Dokumen	54.900.000,30	0,30		
3.25.06.1.21.0002	Penyediaan Rekomendasi Perizinan dan Informasi (tan Usaha) Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha MUK Negara dan Penyediaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi (tan Usaha) Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha MUK Negara dan Penyediaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	80 Dokumen	27.000.000,00	80 Dokumen	27.000.000,30	0,30		
3.25.06.1.21.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha MUK Negara dan Penyediaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha MUK Negara dan Penyediaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	2 Laporan	147.740.000,00	2 Laporan	121.918.000,30	-25.821.999,70	Rubah Rincian	Pengurangan Jasa Konsultan individu yang bisa digunakan
3.25.06.1.26	Pengembangan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpapar dan Perdesaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpapar dan Perdesaan	100 Persen	18.732.131.100,00	100 Persen	18.620.864.880,30	-1.111.266.219,70		
3.25.06.1.26.0005	Pengendalian dan Pengawasan Pengembangan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pengembangan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	8 Laporan	1.458.858.100,00	8 Laporan	1.458.858.100,30	0,30		
3.25.06.1.26.0006	Pengembangan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpapar dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpapar dan Perdesaan	7.300 Unit	15.282.481.000,00	7.300 Unit	14.951.944.750,30	-330.536.249,70	Rubah Rincian	Pengurangan sesuai Page 02 Paket Pekerjaan Basah Pembangunan PT dan DP, Balok Material dan Jala Tenaga Api yang bisa digunakan
J U M L A H				47.227.227.980,00		46.840.116.700,30	-387.112.280,70		

Paraf Verifikasi	Nama	Paraf
Kepala Bidang Mitra Bappeda	Arif Kamsar Setiawan, S.T., M.T.	
Ketua Tim Kerja Mitra Bappeda	Indah Darmasanti, S.T., M.M.	

Pt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten



An James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.
NIP. 197502302002121008

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										49.133.595.000,00	54.076.195.000,00	46.840.115.700,00	-2.293.479.300,00						50.316.146.933,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							49.133.595.000,00	54.076.195.000,00	46.840.115.700,00	-2.293.479.300,00						50.316.146.933,00		
3.29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							49.133.595.000,00	54.076.195.000,00	46.840.115.700,00	-2.293.479.300,00						50.316.146.933,00		
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				100 Persen	100 Persen	25.902.963.000,00	23.213.963.000,00	23.455.945.050,00	1.448.937.000,00						27.351.900.000,00		
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	350.000.000,00	350.000.000,00	266.344.000,00	-83.656.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	78.660.000,00	62.250.000,00	22.250.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	12.475.000,00	-25.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	12.484.000,00	-16.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.483.000,00	-17.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh		5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.486.000,00	-14.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	16 Laporan	60.000.000,00	21.340.000,00	16.220.000,00	-43.780.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	13 Laporan	132.500.000,00	132.500.000,00	115.496.000,00	-17.004.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			260.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.01.0008		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	45.500.000,00	45.500.000,00	12.810.000,00	-32.690.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.01.0009		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	32.000.000,00	32.000.000,00	19.640.000,00	-12.360.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	22.657.411.000,00	19.068.411.000,00	20.410.017.800,00	-2.247.393.200,00			-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		23.575.144.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Caji dan Tunjangan ASN</i>				78 Orang/ Bulan	78 Orang/ Bulan	22.136.585.000,00	18.583.585.000,00	19.927.000.000,00	-2.209.585.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			23.120.144.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	460.710.000,00	424.710.000,00	424.705.000,00	-36.005.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	15.148.000,00	15.148.000,00	15.148.000,00	0,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	1.952.000,00	1.952.000,00	1.946.800,00	-3.200,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	8.832.000,00	8.832.000,00	8.832.000,00	0,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.02.0006		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemerkasaan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemerkasaan dan Tindak Lanjut Pemerkasaan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	4.980.000,00	4.980.000,00	4.080.000,00	-900.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			20.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2 Dokumen	5.004.000,00	5.004.000,00	4.104.000,00	-900.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	200.000,00	-4.800.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	200.000,00	-4.800.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	62.200.000,00	62.200.000,00	59.846.000,00	-2.354.000,00			-		ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		60.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	47.646.000,00	-2.354.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	398.390.000,00	398.390.000,00	308.074.800,00	-90.315.200,00			-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		514.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	30.027.000,00	5.027.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	110.625.000,00	10.625.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			155.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	32.429.000,00	2.429.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			24.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	188.390.000,00	188.390.000,00	79.993.800,00	-108.396.200,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	25.000.000,00	8.871.000,00	-6.129.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	25.000.000,00	8.871.000,00	-6.129.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	1.994.962.000,00	2.805.979.000,00	1.845.004.450,00	-149.957.550,00			-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dan masyarakat		1.900.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.744.962.000,00	2.555.979.000,00	1.595.004.450,00	-149.957.550,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh			1.600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	420.000.000,00	498.983.000,00	557.587.000,00	137.587.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		627.756.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	100.000.000,00	160.203.000,00	160.203.000,00	60.203.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	27 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	257.154.000,00	57.154.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh		277.756.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	39 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	50.230.000,00	20.230.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	33.780.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah				83,20 Persen	83,20 Persen	365.000.000,00	1.115.000.000,00	949.436.000,00	1.793.274.541,00							2.158.274.541,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				100 Persen	100 Persen	175.000.000,00	925.000.000,00	844.340.000,00	669.340.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resilien Terhadap Bencana	Pelaku Usaha Pengguna Air Tanah		1.258.274.541,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Penggumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	4 Dokumen	175.000.000,00	925.000.000,00	844.340.000,00	669.340.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resilien Terhadap Bencana			1.258.274.541,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				100 Persen	100 Persen	190.000.000,00	190.000.000,00	105.096.000,00	-84.904.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resilien Terhadap Bencana	Pelaku Usaha Pengguna Air Tanah		900.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Penggumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				21 Dokumen	21 Dokumen	52.584.000,00	52.584.000,00	26.292.000,00	-26.292.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resilien Terhadap Bencana			500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				21 Laporan	21 Laporan	27.416.000,00	27.416.000,00	22.516.000,00	-4.900.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resilien Terhadap Bencana			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	58.288.000,00	-53.712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resilien Terhadap Bencana			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara				80,98 Persen	80,98 Persen	246.484.000,00	653.998.000,00	543.858.000,00	-15.511.608,00							230.972.392,00	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				100 Persen	100 Persen	35.000.000,00	35.000.000,00	25.500.000,00	-9.500.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resilien Terhadap Bencana	Pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara di Kab. Pandelégang, Kab. Lebak, Kab. Serang dan Kota Cilegon		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan				6 Dokumen	6 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	25.500.000,00	-9.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resilien Terhadap Bencana			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				100 %	100 %	206.484.000,00	513.998.000,00	417.758.000,00	211.274.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resilien Terhadap Bencana	Pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara di Kab. Pandelégang, Kab. Lebak, Kab. Serang dan Kota Cilegon		175.972.392,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				5 Laporan	8 Laporan	42.634.000,00	350.148.000,00	335.838.000,00	293.204.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana			70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				6 Dokumen	6 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	17.840.000,00	-17.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana			3.250.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	1 Laporan	128.850.000,00	128.850.000,00	64.080.000,00	-64.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana			102.722.392,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatalaksanaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatalaksanaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	105.000.000,00	100.600.000,00	95.600.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara di Kab. Pandelégang, Kab. Lebak, Kab. Serang dan Kota Cilegon		5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				2 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	105.000.000,00	100.600.000,00	95.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana			5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan				75,00 Persen	75,00 Persen	3.673.396.000,00	8.197.192.000,00	6.066.413.800,00	-3.573.396.000,00							100.000.000,00	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi				100 %	100 %	3.673.396.000,00	8.197.192.000,00	6.066.413.800,00	2.393.017.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial	Pemerintahan Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT																		
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				7 unit	11 unit	3.673.396.000,00	8.197.192.000,00	6.066.413.800,00	2.393.017.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar				90,08 Persen	90,08 Persen	18.945.752.000,00	20.896.042.000,00	15.824.462.850,00	1.529.248.000,00							20.475.000.000,00	
	3.29.06.1.01	Penatalaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatalaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				100 Persen	100 Persen	175.000.000,00	297.490.000,00	203.488.000,00	28.468.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan		825.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	54.900.000,00	-20.100.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial			125.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi																	
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				80 Dokumen	80 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	27.050.000,00	-22.950.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.01.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi																	
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	172.490.000,00	121.518.000,00	71.518.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial			500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.06			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				100 Persen	100 Persen	18.770.752.000,00	20.598.552.000,00	15.620.994.850,00	-3.149.757.150,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial	Rumah Tangga belum Berlistrik		19.650.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.06.0003			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Laporan	9 Laporan	70.752.000,00	1.898.552.000,00	1.469.650.100,00	1.398.898.100,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial			950.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																	
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				8500 Unit	7000 Unit	18.700.000.000,00	18.700.000.000,00	14.151.344.750,00	-4.548.655.250,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial			18.700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
J U M L A H									49.133.595.000,00	54.076.195.000,00	46.840.115.700,00	-2.293.479.300,00							50.316.146.933,00	